

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor - sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya

Kondisi seperti digambarkan tersebut di atas, selaras pula dengan amanat Undang-Undang sektor ke PUPR-an yang meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, Menetapkan visi yaitu “BERINTERAKSI” merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini diharapkan dapat mendorong aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara baik dan benar “*Good Governance*”. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Pelaihari, 31 Januari 2023

Kepala Dinas,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST
NIP. 19750412 199603 1 002

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	16
D. Produk dan Layanan	17
E. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	21
B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	23
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	25
D. Indikator Kinerja Utama	30
E. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 2022	33
F. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	41
1. Sasaran RPJMD	40
2. Eselon II	57
3. Eselon III	72
B. Akuntabilitas Keuangan	
1. Anggaran dan Realisasi 2022	140
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	141
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022	142

BAB IV PENUTUP.....	157
A. Simpulan.....	157
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	157

LAMPIRAN

- 1. IKU**
- 2. Pernyataan Hasil Review**
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- 4. Cascading/Pohon Kinerja**
- 5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)**
- 6. Monev Renstra**
- 7. Matriks Keselarasan**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	25
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Yang Diampu Dinas PUPRP Pada RPJMD Kab. Tanah Laut.....	26
Tabel 2.3. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruan dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	26
Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.....	27
Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.....	30
Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.....	31
Tabel 2.7. Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.....	32
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan kabupaten Tanah Laut	33
Tabel 2.9. Perjanjiaan Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	33
Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	35
Tabel 2.11. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	36
Tabel 3.1. Sasaran Strategisb RPJMD Yang Diampu Dinas PUPRP	42
Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022 Pada Dinas PUPRP	42
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur 2018 s/d 2022 ..	46
Tabel 3.4. Target, Realisasi dan Sasaran Yang Diampu Oleh DPUPRP	52
Tabel 3.5. Target, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPRP	55
Tabel 3.6. Capaian IKU Dinas PUPRP Terhadap Target	56
Tabel 3.7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP.....	57

Tabel	3.8. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP.....	58
Tabel	3.9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 tahun 2022 IKU DPUPRP	59
Tabel	3.10. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 IKU DPUPRP	60
Tabel	3.11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP	62
Tabel	3.12. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP	62
Tabel	3.13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP	63
Tabel	3.14. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP	64
Tabel	3.15. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP	65
Tabel	3.16. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP	65
Tabel	3.17. Realisasi Program, Kegiatan dan umlahj SDM DPUPRP	67
Tabel	3.18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Sekretariat	72
Tabel	3.19. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris	73
Tabel	3.20. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris	73
Tabel	3.21. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris	74
Tabel	3.22. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris	75
Tabel	3.23. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Sekretaris	76
Tabel	3.24. Perbandingan Realiasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Sekretaris	76
Tabel	3.25. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Umpeg	77
Tabel	3.26. Perbandingan Realiasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Umpeg...	78
Tabel	3.27. Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg..	80
Tabel	3.28. Perbandingan realisasi Indikator kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg.....	81
Tabel	3.29. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag Keuangan.....	81
Tabel	3.30. Perbandingan Realiasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Keuangan.....	82
Tabel	3.31. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan	83
Tabel	3.32. Perbandingan Realiasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Perencanaan.....	84
Tabel	3.33. Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Sekretariat.....	86

Tabel	3.34. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Bina Marga	88
Tabel	3.35. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bidang Bina Marga.....	88
Tabel	3.36. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bidang Bina Marga.....	89
Tabel	3.37. Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Bina Marga.....	90
Tabel	3.38. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 tahun 2022 IKU DPUPRP	92
Tabel	3.39. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid CKJK	92
Tabel	3.40. Perbandingan realisasi kinerja indikator Sasaran 1 Kabid CKJK	93
Tabel	3.41. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK	96
Tabel	3.42. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK	96
Tabel	3.43. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK	98
Tabel	3.44. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK	98
Tabel	3.45. Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3 kabid CKJK	99
Tabel	3.46. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK	100
Tabel	3.47. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5 Kabid CKJK Tahun 2022	103
Tabel	3.48. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kabid CKJK	103
Tabel	3.49. Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang CKJK.....	104
Tabel	3.50. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Sumber Daya Air.....	106
Tabel	3.51. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada kabid SDA.....	106
Tabel	3.52. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA.....	107
Tabel	3.53. Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Sumber Daya Air	110

Tabel	3.54. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Tata Ruang	112
Tabel	3.55. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja kabid Tata Ruang	112
Tabel	3.56. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang	113
Tabel	3.57. Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Tata Ruang.....	116
Tabel	3.58. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan	117
Tabel	3.59. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan	117
Tabel	3.60. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan	113
Tabel	3.61. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan	120
Tabel	3.62. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan.....	120
Tabel	3.63. Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Pertanahan.....	123
Tabel	3.64. Realisasi dan Indikator UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi.....	124
Tabel	3.65. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	124
Tabel	3.66. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi.....	125
Tabel	3.67. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	127
Tabel	3.68. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	128
Tabel	3.69. Alat Uji UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	129
Tabel	3.70. Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	135
Tabel	3.71. Jenis Alat Berat dan Alat Lainnya Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi.....	136
Tabel	3.72. Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	141

Tabel 3.73. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	144
Tabel 3.74. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	149
Tabel 3.75. Perbandingan APBD Tahun 2021 dan 2022	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan Antara Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018-2023	24
Gambar 3.1. Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Tata Ruang Tahun 2021	54
Gambar 3.2. Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2022	55
Gambar 3.3. Pengadaan Peralatan Kerja Komputer dan Laptop	79
Gambar 3.4. Dokumen Laporan Keuangan Tahunan, Semester, Triwulan dan Bulanan	83
Gambar 3.5. Beberapa Dokumen Yang Disusun	86
Gambar 3.6. Pemasangan Sambungan Rumah Desa Bumi Asih	95
Gambar 3.7. Sanitasi Perdesaan (Desa handil Babirik dan Desa Handil Gayam).....	97
Gambar 3.8. Pembangunan Drainase (Desa Gunung Melati dan Desa Ranggung)	99
Gambar 3.9. Sosialisasi/Pendampingan Pada Program KOTAKU	102
Gambar 3.10. Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2021	115
Gambar 3.11. Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2022	115
Gambar 3.12. Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan	119
Gambar 3.13. Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Konsolidasi Tanah	121
Gambar 3.14. Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan	122
Gambar 3.15. Kegiatan yang dilakukan pada UPTD Peralatan dan	

Pengujian Material Kontruksi	
131	
Gambar 3.16. Beberapa Alat Barat Pada UPT Peralatan	
137	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ *good governance* ” (pemerintahan yang baik). Agar “ *good governance* ” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya “ *alignment* ” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia pemerintahan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka (LKj) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan (LKj) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan (LKj), yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Inpres Nomor 7 tahun 1969 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
3. Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan:
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
- f. Bidang Tata Ruang terdiri;
- g. Bidang Pertanahan;
- h. UPT Dinas yaitu UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberika kepada daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPTD dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih rinci uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut seperti uraian dibawah ini.

Uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang bina marga;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian perizinan, non perizinan / rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyaian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- f. melaksanakan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- m. melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya air dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah di bidang sumber daya air serta pemanfaatan dan sumber daya air, pengelolaan data dan pemeliharaan proyek-proyek di bidang air baku;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penelitian /survey, Inventarisasi, penyusunan perencanaan teknis dan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan pengairan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan pembangunan bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan, operasi serta pemeliharaan, pengamanan pengairan dan Daerah aliran sungai;
- g. menyusun program dan melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan perizinan, pengamanan pemanfaatan air pada alur sungai dan garis sepadan pantai;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan teknologi perairan sedang dan kecil, sistem informasi dan monitoring jaringan irigasi, pengembangan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat petani pemakai air dan pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat Swasta, BUMN/ BUMD, pemerintah daerah dalam bidang lainnya;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase serta mengadakan pengembangan daerah rawa, sungai, danau, dan bangunan pelengkap;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan dan pembinaan masyarakat serta mengatur pekerjaan pemaknaan dan

pemanfaatan jaringan irigasi serta sumber – sumber air termasuk bendungan sedang atau kecil maupun danau – danau alam atau buatan, rawa dan pantai;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Bina Marga sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang bina marga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program kegiatan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan tehnik, penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kebinamargaan ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian uji mutu, analisa dampak lingkungan dalam pemanfaatan kebinamargaan;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kebinamargaan ;
- f. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan bina marga;
- g. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- h. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria

- c. bidang cipta karya dan jasa konstruksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/rekomendasi Izin mendirikan bangunan(IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Tata Ruang sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan rencana tata ruang daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang tata ruang dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana, perencanaan tata ruang serta penilaian atas pelaksanaannya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program penataan ruang;
- e. mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan rencana pembangunan bidang tata ruang;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyajian data serta informasi Geografi Daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Daerah dan pengembangan kemitraan dalam mengelola tata ruang Daerah;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan pola dasar, propeda, repetada bidang tata rang serta melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan tata ruang;

- i. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan RTRKSK;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan RDTR Kabupaten;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Kabupaten;
- m. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem Kabupaten;
- n. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat Kabupaten;
- o. mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan Pemberianizin pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- r. bidang cipta karya dan jasa konstruksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/rekomendasi Izin mendirikan bangunan(IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Pertanahan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pertanahan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subjek dan objek pengaduan atas permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pengurusan hak – hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subyek dan obyek ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan inventarisasi tanah kosong;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pemanfaatan tanah kosong;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan proses penerbitan perizinan/ non perizinan / rekomendasi izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- p. perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- q. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan toponimi;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan; dan

- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sedang UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana uraian dibawah ini.

Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi terdiri atas :

- a. UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Peralatan dan Pengujian Material konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan peralatan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan peralatan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan peralatan;
- e. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi;
- f. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
- g. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu Konstruksi;
- h. pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/perbaikan Konstruksi;
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Sedangkan uraian tugas UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan peralatan dan laboratorium pengujian material konstruksi;
- b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi berdasarkan Renstra/Renja Dinas;

- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang peralatan dan pengujian material konstruksi sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- e. melaksanakan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan;
- f. menghimpun dan mengolah data serta informasi
- g. yang berhubungan dengan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan pengujian material konstruksi dan informasi konstruksi;
- k. menyusun jadwal pemakaian peralatan untuk ketertiban operasionalnya;
- l. menghimpun dan mengolah data pelaksanaan pemakaian peralatan;
- m. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi pemakaian peralatan dan laboratorium pengujian material konstruksi;
- n. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana peralatan dan Laboratorium Pengujian Material Konstruksi pada wilayah UPTD;
- o. melaksanakan pembinaan teknis dan melaksanakan fasilitasi penggunaan teknologi dalam pemeriksaan laboratoris;
- p. melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu konstruksi;
- q. melaksanakan pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/ perbaikan konstruksi;
- r. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
- s. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- t. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;

- u. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa sewa ataupun peminjaman peralatan dan jasa perbengkelan;
- v. melaksanakan kerja sama peralatan maupun perbengkelan dalam optimalisasi pelayanan masyarakat; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

C. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan capaian kinerja selama kurun waktu 2014-2018 serta proyeksi selama lima tahun mendatang kurun waktu 2018-2023, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pengelolaan barang belum optimal
- Masih kurangnya pengelola kegiatan dan Administrasi yang bersertifikat.
- Belum Optimalnya data dan Informasi yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
- Belum seluruh jalan dan Jembatan dalam kondisi baik sesuai kapasitas jalan dan jembatan kabupaten.
- Terdapat defisit imbalan air pada sebagian Daerah Irigasi (DI).
- Belum optimalnya penyediaan dan pengolahan air baku.
- Ruang lingkup penanganan yang kompleks.
- Belum maksimalnya koordinasi lintas SKPD terkait bidang SDA.
- Berkurangnya areal pertanian/tanaman pangan.
- Kurangnya infrastruktur air baku.
- Belum sinkronnya mapping antar sektor (one map).
- Masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap air minum yang layak.
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah.
- Belum sepenuhnya RTRW menjadi acuan Program Pembangunan dan panduan masyarakat dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- Masih adanya permasalahan dan konflik kepemilikan dan hak atas tanah.
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat khususnya terkait fungsi lahan produktif untuk kepentingan lainnya.

Di samping permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di

atas adalah :

1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya fasilitas umum;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
4. Meningkatkan kemantapan jalankabupaten;
5. Meningkatkan ketersediaan air irigasi;
6. Meningkatkan cakupan layanan air minum permukiman;
7. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah permukiman;
8. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang;
9. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
10. Meningkatkan implementasi SPIP;
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

D. Produk dan Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dan untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi dinas;
5. pembinaan UPT Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut produk dan layanan yang ada

pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing bidang.

Pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi :

1. Pembangunan gedung SKPD, pembangunan puskesmas, pembangunan gedung kantor instansi vertical
2. Pembangunan pagar sekolah, paving blok halaman dan sarana pendukung lainnya.
3. Pembangunan ruang kantor dan sarana pendukungnya.
4. Pembuatan drainase.
5. Pembuatan sumur bor.
6. Pemasangan jaringan perpipaan.
7. Perluasan sambungan rumah.
8. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal .
9. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM .
10. Pendamping PANSIMAS.

Pada Bidang Bina Marga :

1. Rehabilitasi jalan dan jembatan.
2. Pembangunan jalan dan jembatan.
3. Peningkatan Jalan.
4. Penggantian jembatan.
5. pelebaran dan peningkatan jalan.

Pada Bidang Sumber Daya Air :

1. Pembangunan embung,
2. Pembuatan siring pengaman sungai dan saluran.
3. Pembangunan bangunan pengaman pantai.
4. Normalisasi sungai.
5. Pembuatan jembatan pertanian dan jembatan gantung.
6. Pembangunan pintu air, tabat beton.
7. Pembangunan bangunan irigasi, saluran irigasi.
8. Rehabilitasi embung dan jaringan irigasi.
9. Rehabilitasi tanggul, rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi bendung irigasi, rehabilitasi jembatan pertanian, rehabilitasi tanggul penahan sungai.

Pada Bidang Tata Ruang :

1. Dokumen Laporan Akhir Peninjauan Kembali Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut.
2. Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Bati-Bati.
3. Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Pelaihari.
4. Dokumen Laporan Rencana (Laporan Akhir) RDTR dan PZ WP Takisung.
5. Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Penyipatan.
6. Dokumen Laporan Pembuatan Unsur Peta Dasar GCP Kecamatan Tambang Ulang.
7. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Pelaihari.
8. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Takisung.
9. Dokumen Matek dan Ranperkada Kecamatan Bati-Bati.

Pada Bidang Pertanahan :

1. Dokumen Permasalahan Jalan Akses Masyarakat di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin yang berada di dalam Lahan HGU PTPN XIII Pelaihari.
2. Dokumen Penyelesaian Konflik/Sengketa Lahan Masyarakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap melalui pemegang kuasa Andi CS/PABNI terhadap PT Smart/Arutmin Indonesia Site Kintap.
3. Dokumen inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
4. Laporan Hasil Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Bajuin.
5. Laporan Hasil Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Takisung.
6. Melaksanakan mediasi terhadap konflik – konflik pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis, yaitu UPT Peralatan dan UPT Laboratorium.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut UPT Peralatan dan dan UPT Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Berdasarkan tugas tersebut UPT Peralatan

mempunyai layanan penyewaan alat – alat berat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang mana dari penyewaan alat – alat berat ini mampu memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengujian material konstruksi dan pengembangan teknologi untuk mendukung capaian kualitas hasil pembangunan/perbaikan konstruksi serta pelayanan informasi konstruksi.

Berdasarkan tugas tersebut UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, untuk melakukan uji material terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, yang mana ini juga mampu memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

E. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, produk dan layanan dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan visi RPJMD, misi RPJMD, tujuan dan sasaran sasaran strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan program dan kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan akuntabilitas kinerja organisasi yang berisi sasaran RPJMD, capaian indikator kinerja utama/eselon 2, capaian kinerja Eselon 3, capaian kinerja Eselon 4 pada Sekretariat dan UPT serta akuntabilitas keuangan yang berisi anggaran dan realisasi APBD, anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program, perbandingan program dan kegiatan dengan tahun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah: “Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”.

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk ada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahtraannya.

- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego

bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”**. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang **BERINTERAKSI** pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** melalui **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**. Fokus pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

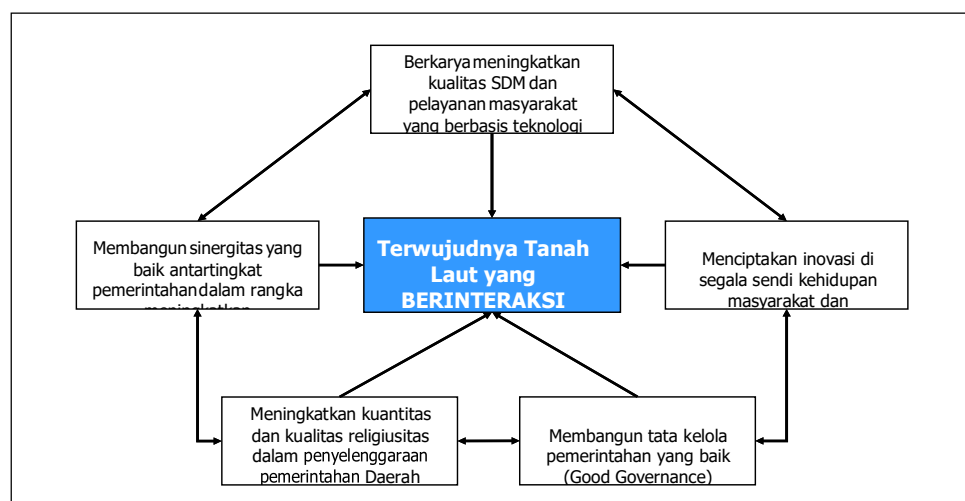
Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI :	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI	
BERKARYA	1.	Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2.	Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3.	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5.	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun yang tujuan dan sasaran yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2018-2023 dengan 2 (dua) tujuan yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Yang Diampu Dinas PUPRP Pada RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023

MISI 5 Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidu	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, maka kemudian dikembangkan dan menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
				Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat
				Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik
2.	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya pelaksanaan dan implementasi penataan ruang kabupaten	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten
3.	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kab. Tanah Laut	Meningkatnya kepatuhan hukum kepemilikan tanah di Kab. Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan
			Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut

Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	Eselon 2								
1	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	38%	59,61%	64%	78%	85%	Kepala Dinas
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	3,13%	31,7%	51,96%	62,68%	70%	
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84%	84%	67%	67,01%	69,17%	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	32,59%	38,55%	41,53%	44,43%	47,39%	
			Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	51,70%	51,90%	52,29%	53,49%	54,69%	

2.	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	70%	78%	87%	92%	97%	
3	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100%	
	Eselon 3								
1	Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUPRP	Nilai sapik dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	BB	BB	BB (70)	A (80,01)	A (80,05)	Sekretariat
		Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terwujudnya pembangunan infrastruktur ke PU an yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	35,63%	59,61%	64%	78%	85%	Bidang Bina Marga
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	26,83%	31,7%	51,96%	62,68%	70%	
		Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	1,80%	1,77%	2,30%	2,83%	3,36%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
			Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	22,23%	29,70%	31,23%	32,76%	34,29%	
			Persentase peningkatan penduduk dengan	1,80%	1,77%	2,30%	2,83%	3,36%	

			akses air minum sehat						
		Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	0,30%	0,20%	52,60%	53,49%	54,38%	
		Meningkatnya saluran drainase yang terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase	3,50%	3,99%	4,58%	4,86%	5,16%	
		Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	20%	21,25%	16,90%	16,90%	16,90%	
			Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	20%	50%	45%	45%	100%	
		Meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	8,70%	17,38%	3,22%	34,74%	43,49%	
		Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84%	84%	67%	67,01%	69,17%	Bidang Sumber Daya Air
			Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	89%	89%	89,84%	91,05%	
			Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	30%	30%	14,72%	15,74%	15,75%	
3	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	-	84%	28%	28%	55%	Bidang Tata Ruang
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	70%	78%	87%	92%	98%	
4	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pertanahan

		Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100%	
--	--	--	---	------	------	------	------	------	--

D. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)}}{\text{Total panjang jalan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total jembatan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas irigasi di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum sehat}}{\text{Total penduduk di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak}}{\text{Total rumah tangga di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang yang dimohonkan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang

4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah sengketa/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan}}{\text{Total sengketa/konflik pertanahan yang masuk ke tingkat kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	$\frac{\text{Jumlah konsolidasi tanah yang diselesaikan}}{\text{Total konsolidasi tanah di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	

Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	Sekretariat
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	
4	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Bidang Bina Marga
5	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
6	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	
7	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	
8	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Bidang Sumber Daya Air
9	Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	
10	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang dikelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik Persentase panjang sungai dalam kondisi baik Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	

11	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Bidang Tata Ruang
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	
12	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Bidang Pertanahan
13	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	
		Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut	

Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	
2	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	
4	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	
5	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Sub bagian Keuangan
6	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Kepala UPT Laboratorium
7	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
8	Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Laboratorium	
9	Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Laboratorium	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	
10	Meningkatnya retribusi sewa alat berat	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Kepala UPT Peralatan
11	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	Sub Bagian TU UPT Peralatan
12	Melakukan pelayanan administrasi	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	

E. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	78%	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	62,68%	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67,01%	Bidang Sumber Daya Air
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	44,43%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	53,59%	
3.	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	92%	Bidang Tata Ruang
4.	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	Bidang Pertanahan
5.	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	

Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	73 (BB)	Sekretariat
2.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	

4.	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	78%	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	62,68%	
5.	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	1,80%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	23,23%	
		Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	1,80%	
6.	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	0,30%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
7.	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	3,50%	
8.	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	20%	
		Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	20%	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	8,70%	
9.	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67,01%	
		Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,84%	Bidang Tata Ruang
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,74%	
10.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	Bidang Tata Ruang
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	92%	
11.	Meningkatnya pengelolaan [ertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	Bidang Pertanahan
		Persentase terkonsolidasi tanah Kabupaten Tanah Laut	100%	

Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	47Dokumen	Sub Bagian Perencanaan
		Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	5 Laporan	
2	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta adminitrasi SDM SKPD	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 buah Mobil Dinas Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	67 Orang PNS dan 79 Orang PTT, 11 Orang TTK	
4	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	Sub bagian Keuangan
5	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 Dokumen	
6	Meningkatnya retribusi sewa uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 100.750.000,-	Kepala UPT Laboratorium
		Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 239.250.000,-	
7	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi alat berat	Jumlah alat berat yang dipenuhi	6 Buah	Kepala UPT Laboratorium
		Jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi	10 Buah	
8	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi berat	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	53 Alat	Sub Bagian TU UPT Peralatan
9	Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	158 pelayanan	
10	Melakukan fasilitas peningkatan SDM UPT Laboratorium	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang bersertifikat	6 orang	

F. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

Pada tahun anggaran 2022 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 12 program dengan 19 kegiatan dan 61 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 3 program dengan 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan, yang terbagi kedalam 2 UPT yaitu UPT Laboratorium berjumlah 2 program, 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sedangkan UPT Peralatan berjumlah 1 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	
A	SEKRETARIAT	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,631,219,864
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,908,200
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,832,100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,076,100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,290,290,970
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,263,780,970
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,510,000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,258,272,169
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32,051,804

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272,966,020
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158,126,463
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,480,000
10	Penyediaan Bahan/Material	13,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778,647,882
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,704,792,413
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494,372,810
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,914,258
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,200,505,345
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,956,112
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196,941,112
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114,015,000
B	BIDANG BINA MARGA	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	156,636,096,471
7	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3,534,199,974
17	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	25,507,155,528
18	Pembangunan Jalan	817,870,000
19	Pelebaran Jalan Menuju Standar	33,545,011,165
20	Rekonstruksi Jalan	46,998,804,877
21	Rehabilitasi Jalan	7,393,684,347
22	Pemeliharaan Rutin Jalan	10,333,822,121
23	Pembangunan Jembatan	21,008,788,680
24	Penggantian Jembatan	7,496,759,779
25	Pemeliharaan Rutin Jembatan	156,636,096,471
C	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38,221,067,443
8	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	38,221,067,443
26	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	400,000,000
27	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	399,999,997
28	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	21,813,413,997

29	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,410,995,449
30	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	11,196,658,000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,727,000,000
9	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,727,000,000
31	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2,727,000,000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13,564,829,000
10	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13,564,829,000
32	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	360,380,000
33	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200,000,000
34	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	13,004,449,000
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31,548,655,137
11	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	31,548,655,137
35	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	31,548,655,137
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	59,999,400
12	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	59,999,400
36	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	59,999,400
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	395,353,831
13	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	395,353,831
37	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	108,453,831
38	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	286,900,000
D	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34,375,119,354
14	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,698,486,658
39	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,467,999,999
40	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,199,996,300
41	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1,149,790,507
42	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6,302,919,308
43	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	399,807,537

44	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	799,728,198
45	Normalisasi/Restorasi Sungai	6,398,534,003
46	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1,459,921,282
47	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	419,789,624
48	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99,999,900
15	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,676,632,696
49	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	599,999,900
50	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	549,370,324
51	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	4,199,907,992
52	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa (DAK)	4,529,747,736
53	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,468,083,852
54	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1,674,733,909
55	Operasional Unit Pengelola Irigasi	654,788,983
E	BIDANG TATA RUANG	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,384,999,678
16	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3,384,999,678
56	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	994,999,748
57	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2,389,999,930
17	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	114,999,751
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	114,999,751
F	BIDANG PERTANAHAN	
11	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	660,776,487
18	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	660,776,487
59	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44,430,000
60	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	616,346,487
12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2,582,353,615
19	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2,582,353,615
61	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	2,582,353,615

G	UPT PERALATAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	198,855,982
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	28,936,897
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,601,376
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,048,134
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,412,387
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13,875,000
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,228,135
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312,400
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,915,735
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164,690,950
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107,250,000
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	57,440,950
H	UPT LABORATORIUM	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112,940,157
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65,374,831
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,713,588
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,605,863
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,105,380
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,950,000
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,275,326
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,275,326
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,290,000
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,500,000
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,790,000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	167,297,556
1	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167,297,556
8	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	167,297,556

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Sasaran RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Misi V yaitu Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat yaitu pada sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dimana target dan realisasi sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Bupati Tanah Laut yang termuat dalam RPJMD 2019-2023 yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis RPJMD Yang Diampu Dinas PUPRP

VISI ke 5	Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	
Sasaran Strategis	Meningkat infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Yang Berkualitas.

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur, dimana realisasi dan capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022 Pada Dinas PUPRP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik	Km	1,400,693	975,97	64,67%
2	Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan	Km	1,826.63	1.342,15	73,48%
3	Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter)	Meter	513,259.92	513,259.92	100.00
4	Jumlah Panjang Irigasi (meter)	Meter	753,940.13	753,940.13	100.00
5	Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar)	Hektar	17,503	17,503	100.00
6	Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter)	Hektar	25,685.98	17,503	68,14

7	Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	Meter	95,349.00	95,569.20	100.23
8	Jumlah Panjang Drainase	Meter	11,649.00	11,869.00	101.89
9	Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun)	Liter	7.271.384.000,00	7.271.384.000,00	100.00
10	Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun)	Liter	10.114.062.400	10.114.062.400	100.00
11	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih	KK	62,255.00	62,255.00	100.00
12	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah	KK	63,371.00	63,585.00	100.34
13	Panjang Jalan Di Perkotaan	Km	409.706	314.02	76,65
14	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Buah	496	496	100.00
15	Jumlah Gedung Kantor	Buah	496	496	100.00

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik.

Pada tahun 2022 indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 1399,49 km dan telah terealisasi sepanjang 975,17 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik adalah sebesar 69,67%.

b. Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan.

Pada tahun 2022 indikator jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan yang sudah ditetapkan ditargetkan sepanjang 1826,63 km, namun pada tahun 2022 tidak ada penambahan jumlah panjang jalan, maka jumlah panjang jalan keseluruhan adalah tetap yaitu sepanjang 1826,63 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang jalan keseluruhan adalah sebesar 100%. Dengan kondisi jalan mantap sebesar 73,48%.

c. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter).

Pada tahun 2022 indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 513.259,92 meter dan telah teralisasi sepanjang 513.259,92 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 100%.

d. Jumlah Panjang Irigasi.

Pada tahun 2022 indikator jumlah panjang irigasi ditargetkan sepanjang 753.940,13 meter dan telah teralisasi sepanjang 753.940,13 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi adalah sebesar 100%.

e. Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar).

Pada tahun 2022 indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi ditargetkan seluas 17.503 hektar dan telah terealisasi seluas 17.503 hektar, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi adalah sebesar 100%.

f. Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter).

Pada tahun 2021 indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi ditargetkan seluas 25.685,98 meter dan telah terealisasi seluas 17.503 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi adalah sebesar 68,14%.

g. Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik.

Pada indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2022 target panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 95.349,00 meter dan telah terealisasi sepanjang 95.569,20 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik adalah sebesar 100,23%.

h. Jumlah Panjang Drainase.

Pada indikator jumlah panjang drainase pada tahun 2022 target panjang drainase sepanjang 11.649 meter dan telah terealisasi sepanjang 66.869 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang drainase adalah 101,89%.

i. Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun).

Pada indikator kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2022 target kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani sebanyak 7.271.384.000 liter/tahun dan telah terealisasi sebanyak 7.271.384.000 liter/tahun, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani adalah 100%.

j. Jumlah Kebutuhan Air Baku (liter/tahun).

Pada indikator jumlah kebutuhan air baku pada tahun 2022 target kebutuhan air baku sebanyak 10.114.062.400 liter/tahun dan telah terealisasi sebanyak 10.114.062.400 liter/tahun, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah kebutuhan air baku adalah 100%.

k. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih.

Pada indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih pada tahun 2022 target rumah tangga berakses air bersih sebanyak 62.255 KK dan telah terealisasi sebanyak 62.255 KK, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih adalah 100%.

l. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah.

Pada indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah pada tahun 2022 target rumah tangga berakses air limbah sebanyak 63.371 KK dan telah terealisasi sebanyak 63.585 KK, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah adalah 100,34%.

m. Panjang Jalan Di Perkotaan.

Untuk tahun 2022 panjang jalan di perkotaan ditargetkan sepanjang 409,706 km dan telah terealisasi sepanjang 283,95 km, sehingga dapat dilihat capaian indikator panjang jalan di perkotaan adalah sebesar 82.26%.

n. Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik.

Pada indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik pada tahun 2021 target gedung kantor dalam kondisi baik adalah sebanyak 428 buah dan telah direalisasi sebanyak 462 buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik adalah 107,94%.

o. Jumlah Gedung Kantor.

Pada indikator jumlah gedung kantor pada tahun 2022 target gedung kantor dalam kondisi baik adalah sebanyak 496 buah dan telah direalisasi sebanyak 496 buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah gedung kantor adalah 100%.

Sedangkan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2018 - 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur 2018 s/d 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik	Km	576,311	565,014	831.915	431,70	975,97
2	Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan	Km	928,258	969,067	1088.805	1.826,63	1.324,15
3	Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter)	Meter	504,525.76	505,397.68	567,871.24	506.787,659	513,259.92
4	Jumlah Panjang Irigasi (meter)	Meter	753,940.13	753,940.13	753,940.13	753,940.13	753,940.13
5	Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar)	Ha	17.111	17.111	17.111	17.111	17,503
6	Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter)	Meter	25685.97841	25685.97841	25685.97841	25.685,98	17,503
7	Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	Meter	30.984	41.570	56.554	67.121	95,569.20
8	Jumlah Panjang Drainase	Meter	0	12.487,7	11.334	67.128,20	78.997,20
9	Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun)	Liter	3.388.896.000	3.403.296.000	3.868.876.800	4.303.262.400	7,271,384,000.00
10	Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun)	Liter	9.768.816.000	9.904.032.000	9.904.032.000	10.041.588.000	10,114,062,400.00
11	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih	KK/SR	23.714	28.016	33.971	36,843	62,255.00
12	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah	KK/SR	2,620	45.109	45.374	46,533	63,585.00
13	Panjang Jalan Di Perkotaan	Km	234,015	257,781	258,9	261,31	314,02
14.	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Buah	392	392	428	462	496
15.	Jumlah Gedung Kantor	Buah	392	392	428	462	496

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik.

Untuk jalan lokal primer dalam kondisi baik, target pembangunan jalan yang ditetapkan yaitu sepanjang 1.400,693 km, dimana untuk tahun 2018 mampu terealisasi sepanjang 576,311 km atau sebesar 41,66%, tahun 2019 telah terealisasi sepanjang 565,014 km atau sebesar 40,36%, tahun 2020 mampu terealisasi sepanjang 831,915 atau sebesar 45,54%, tahun 2021 mampu terealisasi sepanjang 931,07 km atau sebesar 66,52%, kemudian tahun 2022 terealisasi sepanjang 975,17 km atau sebesar 69,67% dari target yang telah ditetapkan sehingga realisasi kinerja untuk tahun 2022 mengalami kenaikan.

b. Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan.

Untuk jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 1826,63 km, tahun 2022 tidak ada perubahan pada SK Jalan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1826,63 km. Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi pada tahun 2018 kondisi jalan mantap sepanjang 928,29 km atau sebesar 50,82%, tahun 2019 sepanjang 969,02 km atau sebesar 53,05%, 2020 sepanjang 1077,71 km atau sebesar 59%, tahun 2021 sepanjang 1180,19 km atau sebesar 64,61%. Kemudian pada tahun 2022 sepanjang 1342,15 km atau sebesar 73,48% dari target yang telah ditetapkan. Jadi realisasi kinerja untuk tahun 2022 meningkat sepanjang 161,96 km dan capaian kinerja untuk tahun 2022 meningkat sebesar 8,87% dari tahun lalu.

c. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter).

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan realisasi panjang irigasi dalam kondisi baik, sampai dengan tahun 2021 kenaikannya sepanjang 2.261,90 meter, namun pada tahun 2022 ada peningkatan terhadap jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik yaitu sepanjang 6.472,26 meter, sehingga panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2022 adalah meningkat menjadi sepanjang 513.259,92 meter.

d. Jumlah Panjang Irigasi.

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak ada kenaikan target panjang irigasi, dikarenakan adanya inventarisasi bidang SDA sehingga pada tahun 2022 panjang irigasi sampai adalah 753.940,132 meter.

e. Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar).

Untuk indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 target luas areal yang dilayani irigasi tetap yaitu seluas 17.111 hektar, namun pada tahun 2022 ada peningkatan terhadap jumlah realisasi luas areal yang dilayani irigasi menjadi 17.503 hektar, sehingga sampai dengan tahun 2022 luas areal yang dilayani irigasi adalah meningkat sebesar 392 hektar.

f. Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter).

Untuk indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 target luas areal yang harus dilayani irigasi adalah tetap, yang mana dari target tersebut mampu terealisasi seluruhnya, sehingga sampai dengan tahun 2022 luas areal yang harus dilayani irigasi adalah tetap.

g. Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik.

Untuk indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, pada tahun 2022 ada kenaikan sepanjang 28.448,2 meter, sehingga panjang drainase dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2022 adalah menjadi 95,569.20 meter.

h. Jumlah Panjang Drainase.

Untuk indikator jumlah panjang drainase dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2022 kenaikannya sepanjang 11.869 meter yang mana kenaikan tersebut mampu menambah jumlah panjang drainase di Kabupaten Tanah Laut, sehingga panjang drainase sampai dengan tahun 2022 adalah meningkat menjadi 78.997,20 meter.

i. Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun).

Untuk indikator jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan, dimana tahun 2022 kenaikannya sebanyak 4.295.991.016 liter/tahun yang mana kenaikan tersebut mampu menambah kebutuhan air baku yang dapat dilayani, sehingga kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani sampai dengan tahun 2022 adalah meningkat menjadi 7.271.384.000 liter/tahun.

j. Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun).

Untuk indikator jumlah kebutuhan air baku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan, dimana tahun 2022 kenaikannya sebanyak 102.474.000 liter yang mana kenaikan tersebut mampu menambah kebutuhan air baku yang diperlukan, sehingga kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani sampai dengan tahun 2022 adalah meningkat menjadi 10.114.062.400 liter/tahun.

k. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih.

Untuk indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan, dimana tahun 2022 kenaikannya sebanyak 25.412 KK yang mana kenaikan tersebut mampu terlayani seluruhnya, sehingga rumah tangga berakses air bersih sampai dengan tahun 2022 adalah meningkat menjadi sebanyak 62.255 KK.

l. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah.

Untuk indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan, dimana tahun 2022 kenaikannya sebanyak 17.052 KK yang mana kenaikan tersebut mampu terlayani seluruhnya, sehingga rumah tangga berakses air limbah sampai dengan tahun 2022 adalah meningkat menjadi sebanyak 63.585 KK.

m. Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik.

Untuk indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada kenaikan, dimana tahun 2021 kenaikannya sebanyak 36 konstruksi, yang mana kenaikan tersebut mampu terbangun seluruhnya, sehingga jumlah gedung kantor dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2022 adalah meningkat menjadi sebanyak 496 buah.

n. Jumlah Gedung Kantor.

Untuk indikator jumlah gedung kantor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan, dimana tahun 2022 kenaikannya sebanyak 36 konstruksi, yang mana kenaikan tersebut mampu terbangun seluruhnya, sehingga jumlah gedung kantor sampai dengan tahun 2022 adalah meningkat menjadi sebanyak 496 buah.

o. Panjang Jalan Di Perkotaan.

Untuk panjang jalan di perkotaan dari target pembangunan jalan yang ditetapkan yaitu sepanjang 345,18 km, Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi di tahun 2018 kondisi jalan mantap di perkotaan sepanjang 234,015 km atau sebesar 67,80%, tahun 2019 sepanjang 257,781 km atau sebesar 74,68%, tahun 2020 sepanjang 258,9 atau sebesar 75,05%. Pada tahun 2021 sepanjang 261,31 km atau sebesar 75,70% dari target yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2022

sepanjang 283.95 km atau sebesar 82,26% dari target yang telah ditetapkan. Jadi realisasi kinerja untuk tahun 2022 meningkat sepanjang 22.64 km dan capaian kinerja untuk tahun 2021 meningkat sebesar 5,58% dari tahun lalu.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Pada indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik, jumlah panjang jalan keseluruhan dan panjang jalan diperkotaan dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 30,82% untuk jalan lokal primer dalam kondisi baik, peningkatan ini dikarenakan perubahan kondisi jalan dari kondisi rusak ke kondisi baik.
- b. Pada indikator jumlah panjang jalan keseluruhan pada tahun 2022 tidak mengalami penurunan/peningkatan dikarenakan sesuai dengan SK jalan Kabupaten yaitu 1826,633 Km.
- c. Pada indikator panjang jalan diperkotaan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,88 % hal ini terjadi karena peningkatan kondisi jalan dari kondisi rusak ke kondisi baik dari pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di perkotaan sehingga terjadi peningkatan kondisi panjang jalan mantap diperkotaan.
- d. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik.
Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sepanjang 694,99 meter, sehingga pada tahun 2022 mengalami kenaikan sepanjang 6.472,621 meter, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 dilaksanakannya rehabilitasi jaringan irigasi dengan kondisi rusak menjadi kondisi baik, sehingga panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2022 adalah menurun menjadi sepanjang 513.259,92 meter.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{P \text{ baik}}{P \text{ irigasi}}$$

Dimana:

P baik = Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

P irigasi = Panjang Irigasi

Semakin tinggi kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi menyebabkan peningkatan perbaikan irigasi pada saluran primer, sekunder, tersier, suplesi dan pembuang untuk meningkatkan nilai panjang irigasi dalam kondisi baik.

e. Jumlah Panjang Irigasi.

Jumlah panjang irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sama, yang mana sampai dengan tahun 2021 tidak terjadi peningkatan/penurunan, dan pada tahun 2022 tidak terjadi penurunan target sesuai dengan data inventarisasi bidang SDA, sehingga panjang irigasi sampai dengan tahun 2022 adalah tetap menjadi 753.940,13 meter.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{P}{P \text{ irigasi}}$$

Dimana:

P = Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

P irigasi = Panjang Irigasi

Tidak adanya pengembangan irigasi menyebabkan Panjang saluran irigasi (primer, sekunder, tersier, suplesi dan pembuang tidak mengalami perubahan.

f. Jumlah luas areal yang telah dilayani irigasi pada tahun 2022 sekitar 68.14% dari seluruh area yang harus dilayani yaitu sekitar 25.685,98 Ha.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$L = \frac{L \text{ fungsional}}{L \text{ potensial}}$$

Dimana:

L fungsional = Luas Areal yang Dilayani Irigasi

L potensial = Luas potensial Irigasi

g. Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2022 mengalami peningkatan sepanjang 11.869,00 meter atau sebesar 17.68%.

- h. Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 72.474.400 liter, sehingga kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2022 sebesar 10.144.062.400 liter.
- i. Jumlah rumah tangga berakses air bersih sudah mengalami peningkatan sekitar 25.712 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu sekitar 62.555 rumah tangga.
- j. Jumlah rumah tangga berakses air limbah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sekitar 17.052 rumah tangga. Dimana pada tahun 2021 jumlah rumah tangga berakses air bersih yang terealisasi adalah 36,483 rumah tangga sehingga jumlah seluruh rumah tangga berakses air limbah yang terealisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 63.585.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. Adapun realisasi dan target sasaran RPJMD tahun 2022 yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Sasaran Yang Diampu Oleh DPUPRP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	87%	92%	97%	105%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2022 terealisasi sebesar 97% dari target 92% sehingga capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 105%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Luas permohonan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$$

$$= \frac{30.937,52}{31.865,16} \times 100 \% = 97,09\%$$

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW pada tahun 2022 terealisasi sebesar 97% dari yang ditargetkan juga sebesar 92%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah 105%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 97%, sedangkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 87%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah meningkat sebesar 10%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut memiliki luas 363.135 hektar yang terbagi dalam beberapa indikasi pola ruang. Adapun indikasi pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Kawasan lindung terdiri dari:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan pantai;
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan sungai;
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan danau dan waduk;
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan mata air;
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan irigasi;
- i. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
- j. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;

- k. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
- l. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
- m. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan wisata alam;
- n. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- o. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- p. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- q. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- r. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

2. Kawasan budidaya terdiri dari:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan;
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perindustrian;
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasanbperuntukan lainnya.

Berdasarkan indikasi pola uang diatas, yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting terindikasi seluas $\pm 3\%$ dari luas permohonan pemanfaatan ruang yang di mohonkan atau seluas $\pm 927,64$ Ha, dan terindikasi pemanfaatan ruang yang telah berkesesuaian dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR mencapai $\pm 97 \%$ atau seluas $\pm 30.938,02$ Ha.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016- 2036 dan direncanakan pada tahun 2023 akan dilakulan proses legalisasi revisi Peraturan Daerah tersebut. Pada tahun 2022 juga telah ditetapkan 3 Peraturan Bupati yaitu:

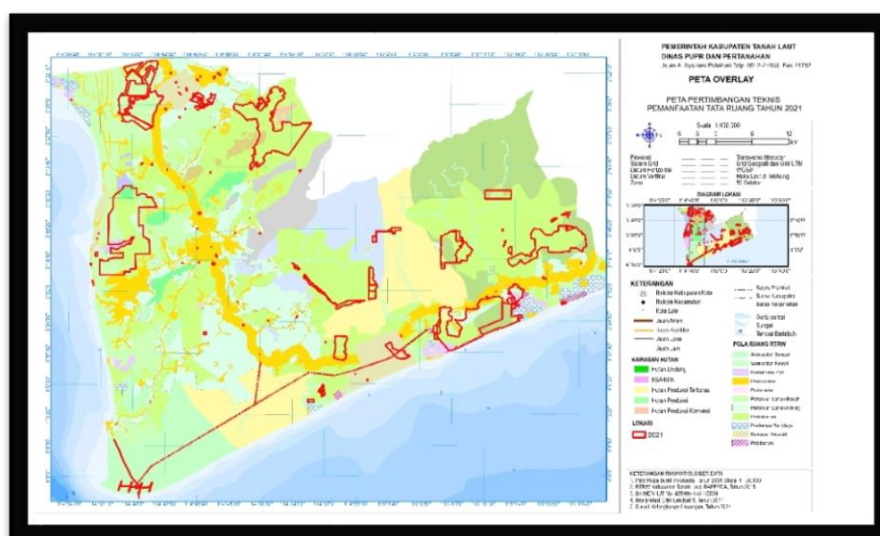
- 1). Peraturan Bupati Nomor No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042
- 2). Peraturan Bupati Nomor No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042, dan Perbup No 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042

3). Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022

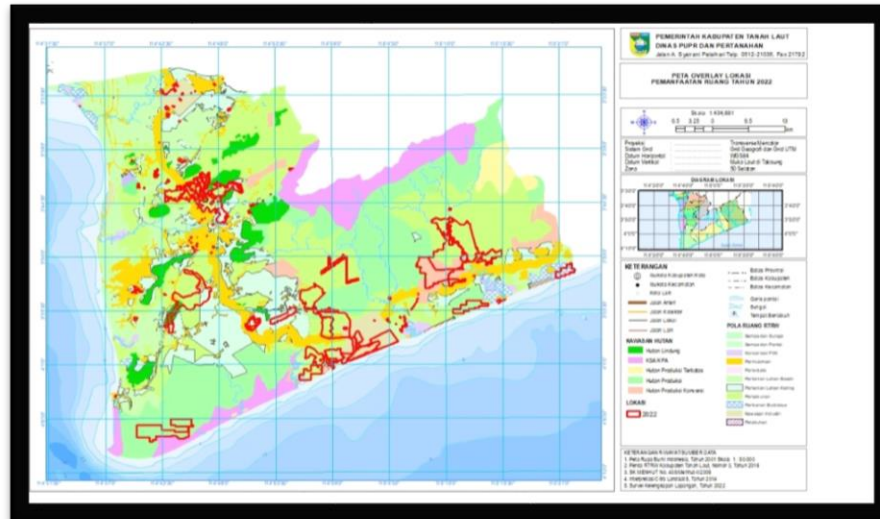
Dengan dasar Perda dan Perbub tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah laut melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melakukan upaya-upaya agar tata ruang wilayah sesuai dengan Perda RTRW dan perbub RDTR minimal 92% yaitu :

- 1) Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 2) mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3) Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
- 4) Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.

Gambar 3.1
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2021



Gambar 3.2
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2022



2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 195 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Target, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPRP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan infrastruktur ke pu an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	78%	73,48%	94,21
		2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	62,68%	63,09%	100,65
		3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67,01%	68,077%	101,49
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	28,44%	30,25%	106,36

	permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	53,94%	73,38%	100,09
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	92%	92%	100
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100
5	Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	100	100%	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian IKU Dinas PUPRP Terhadap Target

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	59	64,61	78	73,48	94.21
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	31,7	51,96	62,68	63,09	100.65
3	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	84	67	67,01	68,077	101,49
4	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	38,90	14,46	44,43%	30,25	106,36
5	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	0,18	53,28	73,38	73,45	100,09
6	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase	100	87	92	92	100
7	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	100	100	100	100	100
8	Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	100	100	100%	100

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an.

Sasaran meningkatkan infrastruktur ke PU an diukur melalui 3 (tiga) indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	78	73,48	94.21
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	62,68	63,09	100.65
3	Persentase Irigasi kabupatne dalam kondisi baik	Persentase	67,01	68,077	101,49

1. Perbandingan Realisasi dan Target.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pencapaian indikator kinerja jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2022 terealisasi sebesar 73,48% dari panjang jalan 1826,633 km atau terealisasi sepanjang 1.346,411 km, dari yang ditargetkan sebesar 78% atau sepanjang 1.424,77 km, sehingga dapat dilihat capaian kinerja jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah 94,21%.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap.

c. Pencapaian indikator kinerja jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022 terealisasi sebesar 63,09% atau terealisasi sepanjang 12 Unit dari seluruh jembatan 102 Unit, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah 100,65%.

d. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 terealisasi sebesar 68,077% dari yang ditargetkan juga sebesar 67,01%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase irigasi kabupatn dalam kondisi baik adalah 101,49%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	59,61	64,61	78	73,48	94.21
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	48,04	51,96	62,68	63,09	100.65
3	Persentase Irigasi kabupatne dalam kondisi baik	Persentase	84	67	67,01	68,077	101,49

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)

Realisasi kinerja indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 73,48% dibandingkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 64,61% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah meningkat sebesar 8,87%.

b. Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Realisasi indikator kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 63,09%, sedangkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 51,96% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah meningkat sebesar 11,13%.

c. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, dimana tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 67%, sehingga tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 68,077% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah meningkat sebesar 1,07%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Pada indikator kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) dan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2022 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, ditargetkan dan dianggarkan mampu terealisasi dengan baik. Selain menggunakan anggaran APBD, untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut juga dengan menggunakan dana pusat yaitu melalui DAK.
- b. Pada indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dimana tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

SASARAN 2 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman Yang Mencakup Air Minum Dan Sanitasi.

Sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi diukur melalui 2 (dua) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penduduk berakses air minum layak	Persentase	71,89%	73,71	102,5
2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	53,49%	73,38	141,93

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Persentase penduduk berakses air minum layak.

Realisasi indikator kinerja persentase penduduk berakses air minum layak tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 73,71% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 42,18% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penduduk berakses air minum layak adalah

sebesar 73,71%. Untuk pelayanan pokok air minum target tahun pada tahun 2022 sebesar 63.829 KK dan teralisasi sebesar 63.829 KK dari jumlah penduduk sebanyak 86.593 KK. sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah meningkat sebesar 31,53 %.

- b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik tahun 2022 terealisasi sebesar 73,38% dari yang ditargetkan sebesar 53,49%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah 141,93%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	38,90	42,18	71,89%	73,71	102,5
2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	52,29	53,28	53,49	73,38	141,93

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Persentase penduduk berakses air minum sehat.

indikator kinerja persentase penduduk berakses air minum layak tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 73,71% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 42,18% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penduduk berakses air minum layak adalah sebesar 73,71%. Untuk pelayanan pokok air minum target tahun pada tahun 2022 sebesar 63.829 KK dan teralisasi sebesar 63.829 KK dari jumlah penduduk sebanyak 86.593 KK. sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah meningkat sebesar 31,35%.

- b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik.

Realisasi indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 73,38% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 53,28% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah meningkat sebesar 20,1%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase penduduk yang berakses air minum layak.

Realisasi indikator kinerja persentase penduduk yang berakses air minum sehat, tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dijelaskan bahwa adanya program batuan SPAM berbasis masyarakat serta adanya hibah air minum perdesaan dari Kementerian PUPR. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan SPAM dan Pembangunan Sumur Bor.

b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik

Realisasi indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi baik, tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dijelaskan karena adanya kegiatan DAK Sanitasi dan Sanitasi Perdesaan dari Kementerian PUPR. Dengan adanya anggaran dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik baik menggunakan dana APBD maupun dana hibah dari pusat/DAK.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Masih terbatasnya anggaran yang diberikan karena masih dalam kondisi pandemi covid 19 sehingga tidak semua usulan dapat terakomodir.
2. Adanya perubahan regulasi yang melibatkan perubahan segmentasi paket pelaku jasa konstruksi membuat keterlambatan penyesuaian aturan pelaksanaan pemilihan penyedia
3. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki baik secara jumlah ataupun kemampuan keilmuan secara teknis, sehingga kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya :

1. Memaksimalkan anggaran yang ada, menyelesaikan seluruh pekerjaan yang sudah ditargetkan dan direncanakan.
2. Segera melakukan penyesuaian aturan pelaksanaan kegiatan.
3. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan mengatur jadwal pengawasan serta lebih memaksimalkan PTT yang dimiliki.

SASARAN 3 : Meningkatnya Persentase Kesesuaian Ruang Dengan RTRW.

Sasaran meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW diukur dengan 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	Persentase	92	97	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2022 terealisasi sebesar 97% dari target awal 92% sehingga capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 105%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Luas permohonan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$$

$$= \frac{30.937,52}{31.865,16} \times 100 \% = 97,09\%$$

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2022 terealisasi sebesar 97% dari yang ditargetkan sebesar 92%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten adalah sebesar 105%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	Persentase	78	87	92	97	105

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2022 realisasinya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 97%, sedangkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 87% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten adalah meningkat sebesar 10%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Realisasi yang dicapai tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya berupaya meningkatkan persentase kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten dari target yang ada.

Dalam pencapaian indikator diatas permasalahan yang dihadapi bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Melakukan penyesuaian melalui peninjauan kembali RTRW tahun 2021
2. Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan tata ruang sesuai dengan Perda RTRW baik itu izin lingkungan maupun IMB
3. setiap pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Perda RTRW yang sudah ditetapkan.

SASARAN 4 : Meningkatkan Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut diukur melalui 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian pada indikator persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan adalah sebesar 100%.

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana :

a = Jumlah sengketa Tanah Yang ditangani

b = Jumlah pengadua tanah sengketa garapan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dimana untuk target jumlah pengaduan sengketa tanah 3 Dokumen dan untuk Realisasi penyelesaian sengketa tanah yang di tangani adalah 3 Dokumen dengan capaian persentase sebesar 100 %

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	50%	100%	100%	100%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi kinerja indikator persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan tahun 2022 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan adalah tetap sebesar 100%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan realisasi kinerjanya tidak mengalami peningkatan/penurunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi Permasalahan Lahan PT. KJW dengan Kelompok Masyarakat Kintap (Syahrin dkk) di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Melakukan mediasi Permasalahan Asset Pemerintah Daerah di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang.

Permasalahan lahan PT INHUTANI dengan Masyarakat Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Tumpang tindih alas hak/sertifikat.
2. Pemilik tanah tidak dapat membuktikan penguasaan tanahnya.
3. Pemilik tanah tidak melaksanakan kewajiban memelihara tanda-tanda batas tanah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan data secara akurat dan komprehensif.
2. Perlu ditelusuri status tanah tersebut melalui data yang dimiliki oleh BPN atau kelurahan/Desa.
3. Melakukan pengukuran dan pencantuman titik koordinat batas-batas tanah.

SASARAN 5 : Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut diukur melalui 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	100	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian pada indikator persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 100%.

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana :

a = Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan

b = Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah di Kab. Tanah Laut

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dimana untuk target dokumen Konsolidasi tanah adalah 2 Dokumen dan untuk Realisasi dokumen Konsolidasi tanah yang dilaksanakan adalah 2 Dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Tambang Ulang dan Dokumen PTSL 2022 dengan capaian persentase sebesar 100%

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	100	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi kinerja indikator persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 realisasinya adalah sama dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator persentase terkonsolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2022 realisasi kinerjanya adalah sama/tetap yaitu 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan penginventarisasian tanah pemerintah Kabupaten Tanah Laut mampu terselesaikan dengan baik, yaitu melakukan inventaisasi tanah Pemkab Tanah Laut pada Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Takisung. Serta melakukan kegiatan terkait isin lokasi beberapa perusahaan juga mampu terselesaikan dengan baik yaitu sebanyak 12 kegiatan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Kurangnya falisitas transportasi dalam melaksanakan kegiatan ke lapangan.
2. Kurangnya personil tenaga ukur dilapangan
3. Kurangnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya :

1. Meminjam fasilitas bidang lain atau menggunakan fasilitas pribadi.
2. Menambah waktu pengukuran dilapangan.
3. Berkoordinasi terkait data asset pemerintah daerah dengan BPKAD dan Kantor BPN Kabupaten Tanah Laut.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, didukung dengan 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 298.381.563.726,- dan terealisasi sebesar Rp. 279.426.915.474,- atau 93,65%.

Adapun realisasi program dan kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi Program, Kegiatan dan Jumlah SDM DPUPRP

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5		6	
A	SEKRETARIAT				11	17	2
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,631,219,864					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,908,200	35,154,400	95.25			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,832,100	22,100,000	96.36			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,076,100	13,154,300	93.45			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,290,290,970	8,228,831,242	88.57			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,263,780,970	8,209,470,942	88.62			
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,510,000	19,360,300	73.03			
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000	19,000,000	63.33			
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000	19,000,000	63.33			
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,258,272,169	997,789,935	79.30			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32,051,804	16,723,423	52.18			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272,966,020	236,411,750	86.61			
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158,126,463	109,564,000	69.29			
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,480,000	2,400,000	68.97			
10	Penyediaan Bahan/Material	13,000,000	9,000,000	69.23			
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778,647,882	623,690,762	80.10			
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,704,792,413	2,385,598,112	88.20			

12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494,372,810	225,978,100	45.71			
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,914,258	4,524,000	45.63			
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,200,505,345	2,155,096,012	97.94			
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,956,112	196,249,850	63.11			
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196,941,112	129,109,000	65.56			
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114,015,000	67,140,850	58.89			
B	BIDANG BINA MARGA				14	8	3
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
7	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	156,636,096,471	150,051,466,661	95.80			
17	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3,534,199,974	3,479,018,530	98.44			
18	Pembangunan Jalan	25,507,155,528	24,246,586,050	95.06			
19	Pelebaran Jalan Menuju Standar	817,870,000	783,898,850	95.85			
20	Rekonstruksi Jalan	33,545,011,165	32,426,223,100	96.66			
21	Rehabilitasi Jalan	46,998,804,877	44,608,995,650	94.42			
22	Pemeliharaan Rutin Jalan	7,393,684,347	7,217,386,095	97.62			
23	Pembangunan Jembatan	10,333,822,121	9,990,942,550	96.68			
24	Penggantian Jembatan	21,008,788,680	20,087,776,400	95.62			
25	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7,496,759,779	7,210,639,436	96.18			
C	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI				10	9	-
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38,221,067,443					
8	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	38,221,067,443	34,543,639,080	90.38			
26	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	400,000,000	384,700,000	96.18			
27	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	399,999,997	370,290,000	92.57			
28	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	21,813,413,997	18,636,005,400	85.43			
29	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,410,995,449	4,248,130,000	96.31			
30	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	11,196,658,000	10,904,513,680	97.39			
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,727,000,000					

9	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,727,000,000	2,685,620,000	97.49			
31	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2,727,000,000	2,685,620,000	97.49			
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13,564,829,000					
10	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13,564,829,000	12,363,991,100	91.15			
32	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	360,380,000	331,308,800	91.93			
33	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200,000,000	177,702,000	88.85			
34	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	13,004,449,000	11,854,980,300	91.16			
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31,548,655,137					
11	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	31,548,655,137	30,020,728,114	95.16			
35	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	31,548,655,137	30,020,728,114	95.16			
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	59,999,400					
12	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	59,999,400	36,397,878	60.66			
36	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	59,999,400	36,397,878	60.66			
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	395,353,831					
13	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	395,353,831	207,302,300	52.43			
37	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	108,453,831	25,000,000	23.05			
38	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	286,900,000	182,302,300	63.54			
D	BIDANG SUMBER DAYA AIR				9	10	4
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34,375,119,354					
14	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,698,486,658	19,320,490,366	93.34			
39	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,467,999,999	1,368,392,600	93.21			
40	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,199,996,300	2,107,637,300	95.80			
41	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1,149,790,507	1,043,811,000	90.78			
42	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6,302,919,308	6,171,775,000	97.92			

43	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	399,807,537	396,572,000	99.19			
44	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	799,728,198	763,329,000	95.45			
45	Normalisasi/Restorasi Sungai	6,398,534,003	5,789,578,266	90.48			
46	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1,459,921,282	1,309,785,200	89.71			
47	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	419,789,624	269,869,000	64.29			
48	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99,999,900	99,732,000	99.73			
15	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,676,632,696	12,285,923,550	89.83			
49	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	599,999,900	583,489,500	97.25			
50	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	549,370,324	490,722,000	89.32			
51	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	4,199,907,992	3,838,173,500	91.39			
52	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa (DAK)	4,529,747,736	3,764,180,500	83.10			
53	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,468,083,852	1,375,790,800	93.71			
54	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1,674,733,909	1,647,410,800	98.37			
55	Operasional Unit Pengelola Irigasi	654,788,983	586,156,450	89.52			
E	BIDANG TATA RUANG					7	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,384,999,678					
16	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3,384,999,678	2,768,497,522	82.67			
56	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	994,999,748	789,418,418	79.34			
57	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2,389,999,930	1,979,079,104	82.81			
17	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	114,999,751					
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	114,999,751	51,061,250	44.40			
F	BIDANG PERTANAHAN					5	
11	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	660,776,487					
18	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	660,776,487	603,909,494	91.39			
59	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44,430,000	22,650,000	50.98			

60	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	616,346,487	581,259,494	94.31			
12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2,582,353,615					
19	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2,582,353,615	2,202,371,000	85.29			
61	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	2,582,353,615	2,202,371,000	85.29			
G	UPT PERALATAN					8	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	198,855,982					
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	28,936,897	18,017,000	62.26			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,601,376	4,496,000	97.71			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,048,134	8,061,500	89.10			
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,412,387	982,000	69.53			
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13,875,000	4,477,500	32.27			
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,228,135	5,088,020	97.32			
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312,400	307,020	98.28			
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,915,735	4,781,000	97.26			
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164,690,950	145,526,050	88.36			
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107,250,000	88,981,050	82.97			
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	57,440,950	56,545,000	98.44			
H	UPT LABORATORIUM						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112,940,157					
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65,374,831	62,720,500	95.94			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,713,588	4,251,000	90.19			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,605,863	23,097,500	97.85			
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,105,380	15,422,000	90.16			
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,950,000	19,950,000	100			
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,275,326	8,795,000	98.83			
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,275,326	8,795,500	94.83			

3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,290,000	37,138,550	96.99			
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, ndan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,500,000	26,348,550	95.81			
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,790,000	10,790,000	100			
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	167,297,556					
1	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167,297,556	164,768,000	98.49			
1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	167,297,556	164,768,000	98.49			

3. Indikator Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

❖ SEKRETARIAT

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 pada Sekretariat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Sekeratriat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	SEKRETARIS				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	73 (BB)	72,60	99,5
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta adminitrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	100
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	67 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	67 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	100
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100

	Kepala Sub Bagian Keuangan				
1	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Kepala Sub Bagian Perencanaan				
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja disusun tepat waktu dan sesuai	5 Laporan	5 Laporan	100

❖ Sekretaris

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan.

Pada sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP DPUPRP	73 (BB)	72,60	99,5%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas PUPRP tahun 2022 mampu memperoleh penilaian untuk SAKIP yaitu dengan nilai 72,60 sedikit mengalami penurunan dari nilai yang ditargetkan yaitu dengan nilai 73, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai SAKIP adalah 99,5%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Realisasi	2022
----	-------------------	-----------	------

		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP DPUPRP	77,61	72,07	73	72,60	99,5

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 Nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 72,60, sedangkan tahun 2021 Nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 72,07, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Nilai SAKIP mengalami peningkatan sebesar 0,73 %.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja Nilai SAKIP mengalami peningkatan dimana penilaian pada Laporan Kinerja yang disampaikan ada komponen yang menjadi penilaiannya yaitu pada komponen pencapaian kinerja nilainya masih rendah berdasarkan hasil Reviu Inspektorat Kab. Tanah Laut, akan tetapi secara garis besar seluruh komponen yang menjadi penilaian pada Reviu SAKIP nilai yang diperoleh sudah bagus. Hasil penilaian ini akan dijadikan pedoman dan acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah penyusunan dokumen kinerja, dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah serta laporan SPM.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Sarana Dan Prasarana Dan Administrasi Perkantoran.

Pada sasaran meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3,21
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022
----	-------------------	------------

		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD tahun 2022 terealisasi 100% dari yang ditargetkan 100%, sehingga dapat dilihat capaian kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD adalah 100%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100%	100%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021, yaitu masing-masing 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD realisasi yang dicapai tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di SKPD, segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang segala pelaksanaan administrasi perkantoran baik terkait peralatan dan perlengkapan kerja maupun kenyamanan ruangan atau pun gedung kantor telah dapat terpenuhi, dimana kegiatan pengecatan gedung kantor dan pengecatan pagar mampu terealisasi dan terselesaikan seluruhnya. Untuk peralatan dan perlengkapan kerja juga mampu terpenuhi secara keseluruhan, seperti meja kerja, kursi rapat, mesin scanner, mesin fotocopi, laptop, hardisk portable, dispenser, kompor gas dan alat tulis kantor, sehingga dapat menunjang kinerja para

Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan kerja, pengecatan kantor dan pagar kantor, terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan umum.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan.

Pada sasaran meningkatnya pelayanan administrasi keuangan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target adalah 100%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021, yaitu masing-masing 100% dari yang

ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase keuangan yang disusun dapat dikatakan bahwa tahun 2022 seluruh dokumen keuangan yang ditargetkan mampu disusun dan diselesaikan seluruhnya. Walaupun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala yaitu sering terlambatnya data yang disampaikan ke sub bagian keuangan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut sub bagian keuangan lebih sering mengingatkan kepada bidang dan UPTD untuk segera menyampaikan permintaan data dimaksud sehingga penyusunan laporan dokumen keuangan dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan yang ditargetkan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini yaitu penyusunan dokumen laporan keuangan, baik yang triwulan, semesteran dan tahunan serta laporan kinerja barang/jasa.

❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sasaran 1 : Merencanakan Dan Melaksanakan Pemenuhan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Serta Administrasi SDM SKPD

Pada sasaran merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 buah Mobil Dinas Jabatan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 buah Mobil Dinas Jabatan	100
2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	67 Orang PNS dan 79 Orang PTT, 11 Orang TKK	67 Orang PNS dan 79 Orang PTT, 11 Orang TKK	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani tahun 2022 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya sebanyak 35 Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Buah Jenis dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

- b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2022 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya yaitu sebanyak 67 orang PNS, 79 Pegawai Tidak Tetap dan 11 orang Tenaga Teknis Kontrak dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Realiasi		2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	100
2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	72 Orang PNS dan 78 Orang PTT	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	67 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	67 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2022 secara keseluruhan tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan pada tahun 2021, hal ini dimana sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani tidak mengalami penambahan/berkurang, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah tetap.

b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pada indikator jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2022 ada yang mengalami penurunan dan peningkatan yaitu pada jumlah PNS dan jumlah tenaga PTT, hal ini dimana tahun 2022 PNS yang terlayani dan terpenuhi adalah sebanyak 67 orang PNS sedangkan tahun 2020 sebanyak 71 orang, karena adanya PNS yang memasuki usia pensiun pada tahun 2021, sedangkan untuk tenaga PTT tahun 2021 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 sebanyak 79 orang PTT serta ada penambahan 11 Orang TTK, sedangkan tahun 2021, tidak ada penambahan PTT maupun TTK.

3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran.

Pada indikator jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran tahun 2022 mampu terealisasi seluruhnya, dimana terpenuhinya segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang segala pelaksanaan administrasi perkantoran, baik terkait peralatan dan perlengkapan kerja maupun kenyamanan/keindahan ruangan maupun gedung kantor.

Gambar 3.3
Pengadaan Peralatan Kerja Komputer Dan Laptop

Peralatan Kerja (Komputer)	Peralatan Kerja (Laptop)
----------------------------	--------------------------



- b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pada indikator jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2022 ada yang mengalami penurunan dan peningkatan yaitu pada jumlah PNS dan jumlah tenaga PTT, hal ini dimana tahun 2022 PNS yang terlayani dan terpenuhi adalah sebanyak 67 orang PNS sedangkan tahun 2020 sebanyak 71 orang, karena adanya PNS yang memasuki usia pensiun pada tahun 2021, sedangkan untuk tenaga PTT tahun 2021 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 sebanyak 79 orang PTT serta ada penambahan 11 Orang TTK, sedangkan tahun 2021, tidak ada penambahan PTT maupun TTK.

Sasaran 2 : Melaksanakan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD.

Pada sasaran melaksanakan pemenuhan administrasi perkantoran SKPD diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.27
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2022 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya sebanyak 2 jenis layanan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah

pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2022 secara keseluruhan tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan pada tahun 2021, hal ini dimana jenis layanan yang terpenuhi dan terlayani adalah sama dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 2 jenis layanan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, bahwa pelayanan yang dilakukan yaitu sebanyak 2 jenis pelayanan, yaitu pertama pelayanan administrasi kepegawaian terkait surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan administrasi PNS, PTT maupun TTK dan yang pelayanan administrasi umum terkait surat-surat umum, baik surat masuk maupun surat keluar.

❖ Kepala Sub Bagian Keuangan.

Sasaran : Menyusun Administrasi Keuangan SKPD.

Pada sasaran menyusun administrasi keuangan SKPD diukur melalui 1 indikator yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag Keuangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2022 mampu terealisasi seluruhnya sebanyak 4 Dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 4 Dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Keuangan

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	19 Dokumen	19 Dokumen	4Dokumen	4 Dokumen	100

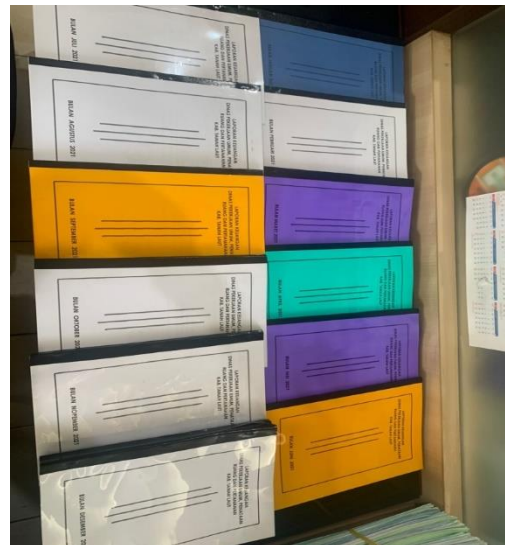
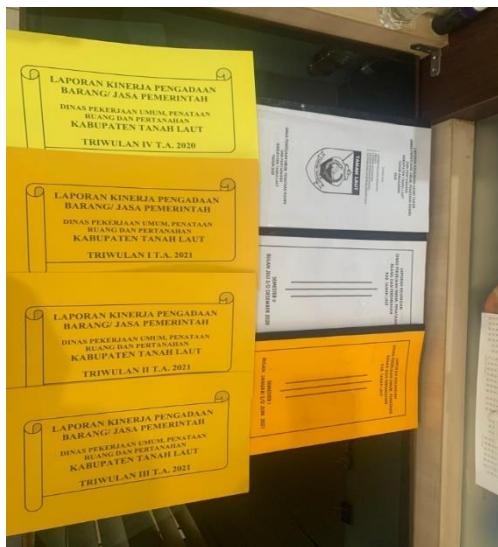
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 dari dokumen yang disusun yaitu sebanyak 4 dokumen, sedangkan tahun 2021 dokumen yang disusun yaitu sebanyak 19 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah menurun menjadi 4 dokumen.

3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

Dari uraian diatas bahwa realisasi pada kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah tetap, namun pada target 2022 mengalami penurunan dikarenakan dokumen-dokumen keuangan yang disusun pada tahun 2022 mengalami penyesuaian target, dimana pada tahun 2021 laporan realisasi fisik dan keuangan yang awalnya berjumlah 12 setelah penyesuaian target pada 2022 berubah menjadi 1 laporan, pada tahun 2021 laporan triwulan yang awalnya berjumlah 4 laporan setelah penyesuaian target pada tahun 2022 berubah menjadi 1 laporan, pada tahun 2021 laporan semester yang awalnya 2 laporan setelah penyesuaian target pada tahun 2022 berubah menjadi 1 laporan, sedangkan untuk laporan keuangan akhir tahun tetap 1 laporan. Dokumen-dokumen yang disusun yaitu dokumen Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari – Desember, Laporan Triwulan I – IV, Laporan Semester dan II, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Gambar 3.4
Dokumen Laporan Keuangan Tahunan, Semester, Triwulan dan Bulanan



❖ Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Sasaran : Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD.

Pada sasaran menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 202 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100
2	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2022 mampu terealisasi seluruhnya sebanyak 7 dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 7 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah laporan perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah 100%.

b. Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2022 mampu terealisasi seluruhnya sebanyak 5 kegiatan dari yang ditargetkan juga sebanyak 5 kegiatan dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah 100%

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	8 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100
2	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	0	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebanyak 7 dokumen, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebanyak 9 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah meningkat sebanyak 7 dokumen.

- b. Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2022 terealisasi sebagaimana yang ditargetkan yaitu sebanyak 5 Dokumen, karena indikator ini merupakan indikator baru, maka tidak dapat ditampilkan realisasi pembandingan untuk tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan masih tidak ada atau 0.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- b. Pencapaian kinerja di Tahun 2022 sebanyak 7 Dokumen, terlihat menurun dibanding Tahun 2021 yaitu sebanyak 9 dokumen, namun dapat dijelaskan bahwa indikator target di tahun 2021 selain penyusunan dokumen perencanaan juga termuat penyusunan laporan kinerja, sedangkan di tahun 2022 penyusunan laporan kinerja dilaksanakan pada sub kegiatan yang berbeda sehingga ada penyesuaian target dibanding tahun 2021. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2022 tidak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
- c. Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan penyusunan Dokumen Lapoan Kinerja dapat dilaksanakan dengan baik dengan tersusunnya 5 Dokumen Laporan Kinerja, sedangkan pada Tahun sebelum nya target indikator berupa pelaksanaan Pameran Pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan karena masih Pandemi Covid 19 sehingga tidak ada perbandingan kenaikan atau penurunan kinerja dari tahun

sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2021.

Gambar 3.5
Beberapa Dokumen Yang Disusun



4. Program/Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 yang ada pada Bidang Sekretariat, didukung dengan 1 program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 13.631.219.864,- dan terealisasi sebesar Rp11.666.373.689,- atau 85,89%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.33
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Sekretariat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,631,219,864	11.666.373.689/	85,89	11	17	2
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,908,200	35,154,400	95.25			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,832,100	22,100,000	96.36			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,076,100	13,154,300	93.45			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,290,290,970	8,228,831,242	88.57			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,263,780,970	8,209,470,942	88.62			
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,510,000	19,360,300	73.03			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000	19,000,000	63.33			
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000	19,000,000	63.33			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,258,272,169	997,789,935	79.30			

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32,051,804	16,723,423	52.18			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272,966,020	236,411,750	86.61			
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158,126,463	109,564,000	69.29			
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,480,000	2,400,000	68.97			
5	Penyediaan Bahan/Material	13,000,000	9,000,000	69.23			
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778,647,882	623,690,762	80.10			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,704,792,413	2,385,598,112	88.20			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494,372,810	225,978,100	45.71			
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,914,258	4,524,000	45.63			
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,200,505,345	2,155,096,012	97.94			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,956,112	196,249,850	63.11			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196,941,112	129,109,000	65.56			
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114,015,000	67,140,850	58.89			
	Total	13,631,219,864					

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Sekretariat diantaranya :

1. Kurang SDM yang dimiliki khusus yang berstatus PNS, baik pada Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan maupun pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
2. Keterlambatan data yang disampaikan oleh bidang dan UPT baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam penyusunan laporan kinerja, dokumen penganggaran serta data – data lainnya.
3. Data yang disampaikan seringkali berubah – rubah, sehingga menghambat dalam proses penyusunan laporan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memaksimalkan PNS, tenaga PTT dan tenaga TTK yang dimiliki pada sekretariat. .
2. Permintaan data lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan dan lebih sering berkoordinasi kepada bidang dan UPT terkait data yang diminta.
3. Data yang disampaikan dilakukan penyimpanan baik dalam bentuk file maupun hardcopynya.

❖ **BIDANG BINA MARGA**

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Bina Marga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.34
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Bina Marga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Bina Marga				
1	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	78%	73,48%	94,21
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	62,68%	63,09%	100,65

❖ **Kepala Bidang Bina Marga**

Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Terintegrasi dan Berkualitas Untuk Mendukung Pergerakan Orang, Barang dan Jasa.

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	78%	73,48%	94,21
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	62,68%	63,09%	100,65

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pencapaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 73,48% dari yang ditargetkan sebesar 78%,

sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 94,21%.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap.

Pencapaian indikator kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 63,09% dari yang ditargetkan juga sebesar 62,68%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 100,65%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.36
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga

No	Indikator Sasaran	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	59,61%	64,61%	78%	73,48%	94,21
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	48,04%	51,96%	62,68%	63,09%	100,65

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap).

Pencapaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 73,48% atau terealisasi sepanjang 1342,21 km sedangkan tahun 2021 hanya terealisasi 64,61% atau teralisasi sepanjang 1180,30 km, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah meningkat sebesar 8,87% atau telah bertambah sepanjang 162,02 km.

b. Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap.

Pencapaian indikator kinerja jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 63,09% sedangkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 51,96%, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap adalah meningkat sebesar 11,13%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap).

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kenaikan sebesar 5 %, atau sepanjang 91,45 km dari panjang Jalan Kabupaten, sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,87% atau sepanjang 162,02 km dari panjang Jalan Kabupaten 1826,63 km. Hal ini dikarenakan Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan seluruh kegiatan yang sudah ditargetkan dan dianggarkan mampu terealisasi seluruhnya.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa jembatan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,92% atau sebanyak 4 Unit, sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,92% atau sebanyak 4 Unit sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,13% atau sebanyak 12 Unit. Hal ini dikarenakan Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan penggantian jembatan yang mengalami kerusakan dan seluruh kegiatan yang sudah ditargetkan dan dianggarkan mampu terealisasi seluruhnya.

1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Bina Marga, didukung dengan 1 program, 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 156,636,096,471,- dan terealisasi sebesar Rp. 150,051,466,661,- atau 95,80%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.37
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Bina Marga

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	156,636,096,471	150,051,466,661	95.80	14	8	3
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	156,636,096,471	150,051,466,661	95.80			

1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3,534,199,974	3,479,018,,530	98.44			
2	Pembangunan Jalan	25,507,155,528	24,246,586,050	95.06			
3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	817,870,000	783,898,850	95.85			
4	Rekonstruksi Jalan	33,545,011,165	32,426,223,100	96.66			
5	Rehabilitasi Jalan	46,998,804,877	44,608,995,650	94.42			
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	7,393,684,347	7,217,386,095	97.62			
7	Pembangunan Jembatan	10,333,822,121	9,990,942,550	96.68			
8	Penggantian Jembatan	21,008,788,680	20,087,776,400	95.62			
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7,496,759,779	7,210,639,436	96.18			
	Total	156,636,096,471	150,051,466,661	95.80			

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Bidang Bina Marga diantaranya :

1. Pekerjaan Fisik tertunda karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pada saat pelaksanaan memerlukan adanya Review Design
2. Beberapa pekerjaan yang merupakan hasil musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD tidak termasuk dalam ruas SK Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan.
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengakomodir program dan Kegiatan bidang Bina Marga.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Dokumen perencanaan yang masih menjadi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) agar dapat segera dikerjakan
2. Prosedur penentuan paket-paket pekerjaan yang disetujui dalam anggaran seharusnya mengakomodir paket pekerjaan yang merupakan ruas jalan dalam SK Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan.
3. Perlu tersedianya anggaran yang mencukupi untuk bidang Bina Marga agar terakomodirnya Program dan Kegiatan bidang Bina Marga.

❖ BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.38
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi				
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	71,89%	73,71%	102,53
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	43,46%	43,46%	100%
		Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	28,44%	30,25%	106,36
2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	73,38%	73,45%	100,09
3	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	5,22%	5,23%	100,19
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	0.086659618 %	0.114390696 %	0.448896823
		Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	45%	100
5	Meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	0	0

❖ Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Sasaran 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Air Bersih.

Pada sasaran meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.39
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	71,89%	73,71%	102,53%
2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	43,46%	43,46%	100%

3	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	28,44%	30,25%	106,36%
---	--	--------	--------	---------

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak pada tahun 2022 terealisasi sebesar 73,71% dari yang ditargetkan sebesar 71,89%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak adalah 102,53 %.

b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 43,46% dari yang ditargetkan juga sebesar 43,46%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah 100%.

c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Pencapaian indikeator kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat pada tahun 2022 terealisasi sebesar 30,25 % dari yang ditargetkan juga sebesar 28,44%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat adalah 106,36%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	3,28%	48,02%	71,89%	73,71%	102,53%
2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	31,23%	23,70%	43,46%	43,46%	100%
3	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	3,28%	24,39%	28,44%	30,25%	106,36%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi kenaikan sebesar 25,69% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 48,02% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase kenaikan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak yaitu sebesar 73,71 %.

b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu mampu terealisasi sebesar 48,02%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah meningkat sebesar 23,70%.

c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air minum sehat tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, dimana tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 24,39% sedangkan tahun 2020 mampu terealisasi sebesar 19,84% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase cakupan rumah tangga dengan air bersih minum sehat adalah sebesar 30,25%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dimana kegiatan yang mampu terselesaikan dengan baik, dan adanya dukungan dana dari pusat melalui dana DAK.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah yang pertama pembangunan SPAM dilaksanakan pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 5 desa,

Kecamatan Bajuin sebanyak 1 desa dan 4 Kelurahan , Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 2 desa dan Kecamatan Kurau sebanyak 5 desa. Dan yang kedua Pembangunan Sumur Bor yang dilaksanakan pada 8 kecamatan

- b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan program Hibah Air Minum Perdesaan dari kementerian PUPR yang tersebar di 9 kecamatan dengan total sambungan rumah sebanyak 1200 SR, sedangkan yang mendapat bantuan sosial program Penyediaan Air Minum Perdesaan dari Kementerian PUPR yaitu desa Desa Jilatan Alur, Desa Pantai Linuh, Desa Kayu Abang, Desa Batu Ampar, Desa Tanjung Dewa.

Gambar 3.6
Pemasangan Sambungan Rumah Desa Bumi Asih



- c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan sambungan rumah untuk mendukung program NUWSP dari Kementerian PUPR. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan IKK Bajuin dan pembangunan sumur bor. Pada kegiatan pembangunan SPAM yaitu pada Kecamatan Pelaihari sebanyak 4

desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Bajuin sebanyak 2 desa, Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 2 desa dan Kecamatan Kurau sebanyak 4 desa. Sedangkan pembangunan sumur bor yaitu sebanyak 33 unit.

Sasaran 2 : Meningkatnya Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi.

Pada sasaran meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.41
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	73,38%	73,45%	100,09

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak pada tahun 2022 terealisasi sebesar 73,45% dari yang ditargetkan sebesar 73,38%, sehingga dapat dilihat capaian kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak adalah 100,09%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	2020	2021	2020
1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	52,60%	63,79%	52,60%	63,79%	52,60%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 63,79% sedangkan tahun 2022

teralisasi 73,45 % dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak yaitu sebesar 73,45%..

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kegiatan DAK Sanitasi dari Kementerian PUPR. Dengan adanya anggaran dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik dengan menggunakan anggaran APBD sebanyak 54 unit yaitu pada Desa Jilatan dan desa Batalang, Sedangkan pembangunan tangki septik menggunakan anggaran dari dana DAK yaitu pada desa Kali Besar sebanyak 50 Unit Individual, Desa Handil Babirik sebanyak 6 unit tangka septik komunal, Desa handil Gayam sebanyak 6 unit komunal dan Desa Swarangan 6 unit Komunal.

Gambar 3.7
Sanitasi Perdesaan (Desa Handil Babirik dan Desa Handil Gayam)



Sasaran 3 : Meningkatnya Saluran Drainase Yang Terbangun.

Pada sasaran meningkatnya saluran drainase yang terbangun diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.43
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	5,22%	5,23%	100,19%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	3,99%	4,56%	5,22%	5,23%	100,19%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2020 yaitu mampu terealisasi sebesar 100,19%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut adalah meningkat sebesar 5,23 %.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan beberapa usulan musrenbang dan pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dapat diakomodir pada anggaran perubahan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan drainase dengan menggunakan anggaran APBD murni sebanyak 33 lokus pada 9 kecamatan dan anggaran APBD perubahan sebanyak 39 lokus yang tersebar di 10 kecamatan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan, pemasangan dan peningkatan drainase lingkungan.

Gambar 3.8
Pembangunan Drainase (Desa Gunung Melati dan Desa Ranggung)



Sasaran 4 : Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Pada sasaran meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.45
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %

1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	0.086659618%	0.114390696%	0.448896823
2	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	45%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0.114390696% dari yang ditargetkan juga sebesar 0.086659618%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan adalah 0.448896823%.

- b. Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Pencapaian indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota pada tahun 2022 terealisasi sebesar 45% dari yang ditargetkan juga sebesar 45%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	19,13%	16,90%	0.086659618%	0.114390696%	0.448896823
2	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	50%	45%	45%	45%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan tahun 2022 sebesar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 16,90% sedangkan tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 0.114390696%, dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat realisasi kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan tercapai sebesar 0.448896823%.

- b. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Realisasi indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota tahun 2022 sebesar 45% tetap dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 tetap terealisasi sebesar 45 sama seperti tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 45%, dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat realisasi kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Pada indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan konstruksi merupakan pendukung dari pekerjaan konstruksi lainnya yang seharusnya dibangun pada tahun 2022 karena beberapa bangunan gedung utama ditangguhkan maka konstruksi pendukung yang seharusnya dibangun tahun 2022 ditunda untuk pelaksanaannya,

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini yaitu pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya sebanyak 36 paket gedung/bangunan/fasilitas lainnya, yang terdiri dari beberapa kantor instansi pemerintah (SKPD), beberapa hibah pembangunan sarana pendukung kantor instansi vertikal/lainnya, puskesmas dan beberapa sarana dan prasarana pendidikan.

- b. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Pada indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dalam hal pengumpulan data terkait penataan bangunan dan lingkungan dilakukan pada seluruh kecamatan kecuali kecamatan pelaihari.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat, mensosialisasikan perda terkait kota kumuh serta melakukan pengumpulan data terkait indikator kota/wilayah kumuh di desa sesuai dengan SK Bupati Tanah Laut.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman adalah perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman ditetapkan berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat dengan menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Gambar 3.9
Sosialisasi/Pendampingan Pada Program KOTAKU



Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi.

Pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.47
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5 Kabid CKJK Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	0	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2022 terealisasi sebesar 0% dari yang ditargetkan sebesar 3,22%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat adalah 0%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	15.64%	0	3,22%	0	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi pada indikator persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020/2021, dimana tahun 2022 tidak terealisasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat adalah menurun sebesar 0%.

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme terkait Uji Kompetensi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Sertifikasi bisa dilakukan jika kuota peserta sudah terpenuhi yaitu 20 Peserta. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan telah melayangkan surat terkait peserta sertifikasi jenjang 6 *Manager Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung*. Hingga akhir batas waktu yang ditentukan, tidak ada peserta yang mendaftar. Hal ini disebabkan kurangnya peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu S1 pengalaman 0 Tahun atau DIII pengalaman 4 Tahun.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 yang ada pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, didukung dengan 6 program, 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 86.516.904.811 dan terealisasi sebesar Rp. 79.857.678.472,- atau 92,30%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.49
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang CKJK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
		86.516.904.811	79.857.678.472	92,30			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38,221,067,443			10	9	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	38,221,067,443	34,543,639,080	90.38			
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	400,000,000	384,700,000	96.18			
2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	399,999,997	370,290,000	92.57			
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	21,813,413,997	18,636,005,400	85.43			
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,410,995,449	4,248,130,000	96.31			
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	11,196,658,000	10,904,513,680	97.39			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,727,000,000					
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,727,000,000	2,685,620,000	97.49			
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2,727,000,000	2,685,620,000	97.49			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13,564,829,000					
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13,564,829,000	12,363,991.100	91.15			
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	360,380,000	331,308,800	91.93			
2	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200,000,000	177,702,000	88.85			
3	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	13,004,449,000	11,854,980,300	91.16			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31,548,655,137					
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	31,548,655,137	30,020,728,114	95.16			
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	31,548,655,137	30,020,728,114	95.16			

	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	59,999,400					
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	59,999,400	36,397,878	60.66			
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	59,999,400	36,397,878	60.66			
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	395,353,831					
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	395,353,831	207,302,300	52.43			
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	108,453,831	25,000,000	23.05			
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	286,900,000	182,302,300	63.54			
	Total						

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi diantaranya :

1. Kondisi wilayah Kabupaten Tanah Laut yang luas dan pemukimannya tersebar dalam beberapa wilayah pelayanan pada 11 Kecamatan, sehingga mempengaruhi nilai investasi dengan layanan yang diberikan.
2. Kurangnya sumber air baku yang tersedia pada Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Panyipatan.
3. Luasnya wilayah pelayanan IKK Pelaihari dan IKK Bajuin, sehingga membutuhkan nilai investasi yang besar, salah satunya kondisi infrastruktur produksi dan distribusi IKK Bajuin yang telah melewati umur ekonomis.
4. Sedang dilakukannya review Perjanjian Kerja Sama / Nota Kesepakatan SPAM Regional Banjarbakula yang harus diperbaharui, dimana saat ini yang beroperasi hanya di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur sedangkan Kecamatan Takisung sedang dalam tahap usulan untuk cakupan layanan.
5. Sedang dalam tahap serah terima asset IPLT Kabupaten Tanah Laut dengan BPPW Kalimantan Selatan yang pendanaannya bersumber dari APBN.

Solusi atau langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain.

1. Mengupayakan tambahan anggaran selain yang bersumber dari APBD, yaitu dari APBN dan atau APBD Provinsi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, CSR, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Perbaikan Kinerja PDAM melalui Program NUWSP (National Urban Water Supply) dari World Bank, serta penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah air minum.

2. Melakukan studi kelayakan potensi air baku pada kecamatan yang kekurangan sumber air baku, agar didapatkan alternatifnya.
3. Melakukan fasilitasi serah terima asset pekerjaan NUWSP dengan Kementerian PUPR, agar dapat maksimal dalam melakukan pelayanan akses air minum bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
4. Menekan kepada pihak Pemerintah Provinsi agar segera mencari solusi kesepakatan, agar SPAM Regional Banjarbakula juga dapat melayani masyarakat Kecamatan Takisung.

❖ BIDANG SUMBER DAYA AIR

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Sumber Daya Air tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.50
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Sumber Daya Air

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67,01	68,01%	101,49
		Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,84	90,25%	100,45
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,74	15,94%	101,27

❖ Kepala Bidang Sumber Daya Air

Sasaran : Meningkatkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air .

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.51
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67,01%	68,01%	101,49
2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,84%	90,25%	100,45
3	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,74%	15,94%	101,27

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tahun 2022 terealisasi sebesar 68,01% dari yang ditargetkan sebesar 67,01%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah 1101,49%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik

T = Nilai Target

Persentase irigasi dalam kondisi baik didasarkan pada peraturan Menteri PUPR mengenai Indeks Kinerja Sistem Irigasi yang terdiri dari penilaian prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A.

b. Persentase panjang sungai dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik tahun 2022 terealisasi sebesar 90,25% dari yang ditargetkan sebesar 89,84%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik adalah 100,45%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik

T = Nilai Target

Persentase sungai dalam kondisi baik terdiri dari penilaian jaringan sungai yaitu sungai induk, sekunder, tersier dan drainase perkotaan.

- c. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Pencapaian indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air tahun 2022 terealisasi sebesar 15,94% dari yang ditargetkan sebesar 15,74%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah 101,27%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase luas kawasan

T = Nilai Target

Persentase luas kawasan terdiri dari wilayah terdampak banjir dan daya rusak air pada wilayah sungai dan pantai di Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	84%	67%	67,01%	68,01%	101,49
2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,66%	89%	89,84%	90,25%	100,45
3	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	30%	26,49%	15,74%	15,94%	101,27

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 68,01% sedangkan tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 67%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah meningkat sebesar 1,01%.

- b. Persentase panjang sungai dalam kondisi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 90,25% sedangkan tahun 2021 mampu terealisasi sebesar

89,84%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah meningkat sebesar 0,38%.

c. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Realisasi indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 15,94% sedangkan tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 26,49%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah menurun sebesar 10,55%.

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa 3 indikator di atas tahun 2022 mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, hal ini disebabkan adanya bencana banjir dan gelombang pasang pada tahun 2021 yang mengakibatkan:

1. Kerusakan pada bangunan irigasi.
2. Pendangkalan pada sungai-sungai.
3. Meluasnya kawasan pantai yang mengalami abrasi.
4. Keruntuhan lereng/tebing di sepanjang bantaran sungai akibat daya rusak air.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Irigasi Kabupaten Berfungsi Baik meliputi:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebanyak 8 dokumen;
2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sebanyak 6 dokumen;
3. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya sebanyak 6 paket pekerjaan;
4. Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya sebanyak 5 paket pekerjaan;
5. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 16 paket kegiatan;
6. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 2 pekerjaan;
7. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 2 paket pekerjaan;
8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 2 paket kegiatan;

9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 4 paket kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Panjang Sungai Dalam Kondisi Baik adalah:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebanyak 14 dokumen;
2. Normalisasi/Restorasi Sungai sebanyak 28 paket pekerjaan;
3. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai sebanyak 4 paket kegiatan,

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi Akibat Daya Rusak Air adalah:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebanyak 14 dokumen;
2. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya sebanyak 2 paket kegiatan.
3. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sebanyak 7 paket pekerjaan;

1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Sumber Daya Air, didukung dengan 1 program, 2 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 34.375.119.354,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.606.413.916,- atau 96,10%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.53

Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Sumber Daya Air

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34,375,119,354			9	10	4
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,698,486,658	19,320,490,366	93.34			
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,467,999,999	1,368,392,600	93.21			
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,199,996,300	2,107,637,300	95.80			
3	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1,149,790,507	1,043,811,000	90.78			
4	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6,302,919,308	6,171,775,000	97.92			
5	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	399,807,537	396,572,000	99.19			
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	799,728,198	763,329,000	95.45			
7	Normalisasi/Restorasi Sungai	6,398,534,003	5,789,578,266	90.48			
8	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1,459,921,282	1,309,785,200	89.71			
9	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	419,789,624	269,869,000	64.29			
10	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99,999,900	99,732,000	99.73			
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,676,632,696	12,285,923,550	89.83			
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	599,999,900	583,489,500	97.25			
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	549,370,324	490,722,000	89.32			
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	4,199,907,992	3,838,173,500	91.39			
4	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa (DAK)	4,529,747,736	3,764,180,500	83.10			
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,468,083,852	1,375,790,800	93.71			
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1,674,733,909	1,647,410,800	98.37			
7	Operasional Unit Pengelola Irigasi	654,788,983	586,156,450	89.52			
	Total	34,375,119,354	31606413916	96,10%			

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Eselon 3 Bidang Sumber Daya Air selama tahun 2022 yaitu :

1. Minimnya anggaran yang tersedia untuk mengatasi berbagai permasalahan ke-Sumber Daya Air-an di Kabupaten Tanah Laut.
2. Ketersediaan lahan dan akses lokasi yang cukup menyulitkan pelaksanaan pekerjaan.
3. Musim penghujan yang terjadi hampir sepanjang tahun sangat menghambat kelancaran pekerjaan.
4. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi secara mandiri
5. Kurangnya sumber daya manusia untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
6. Berubahnya tata fungsi lahan mengakibatkan debit air yang semakin menurun pada jaringan irigasi terutama di musim kemarau
7. Cuaca dan iklim ekstrim tidak menentu mengakibatkan kerusakan yang diakibatkan oleh abrasi dan longsor mengalami peningkatan
8. Pemukiman warga yang merambah sempadan sungai dan pantai
9. Rusaknya bagian hulu DAS mengakibatkan percepatan aliran air yang meninggikan tingkat daya rusak

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian PUPR untuk dapat memperoleh pendanaan di luar APBD Tanah Laut.
2. Kerjasama dengan masyarakat dan aparat desa terkait permasalahan ketersediaan lahan pada saat konstruksi dilaksanakan
3. Memaksimalkan peran serta aparat desa dan masyarakat agar juga terlibat dalam pembangunan
4. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal
5. Memastikan adanya hibah tanah sesuai kebutuhan perencanaan konstruksi
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun pendekatan persuasif ke aparat terkait dan kelompok tani
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang sumber daya air
8. Menata daerah hulu dengan cara berkoordinasi baik secara vertikal maupun sektoral
9. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana
10. Perlunya aturan penerapan batas sempadan sungai dan pantai yang sesuai karakteristik daerah

11. Perlunya kerjasama lintas sektoral menangani kerusakan DAS

❖ **BIDANG TATA RUANG**

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Tata Ruang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.54
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Tata Ruang				
1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	28%	100
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	92%	97%	105

❖ **Kepala Bidang Tata Ruang****Sasaran : Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang.**

Pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	28%	100
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	92%	97%	105

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR.

Pencapaian indikator kinerja persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR tahun 2022 mampu tersealisasi sebesar 28%, dari yang ditargetkan juga

sebesar 28%, sehingga dapat dilihat bahwa persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR adalah 100%.

b. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten.

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2022 mampu tersealisasi sebesar 97%, dari yang ditargetkan juga sebesar 92%, sehingga dapat dilihat bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah 105%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	0%	0%	28%	28%	100
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	78%	87%	92%	97%	105

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase Capaian Kecamatan Yang Sudah Memiliki RDTR.

Realisasi indikator kinerja persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 28% atau sebanyak 3 (tiga) kecamatan dari 11 kecamatan yang di targetkan, sedangkan tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) kecamatan dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR meningkat yaitu sebesar 28 %.

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 97% sedangkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 87% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi

kinerja capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah meningkat sebesar 10%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR.

Realisasi kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, peningkatan ini disebabkan karena terjadi perubahan indikator untuk tahun 2022 sesuai Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 maka persentasenya terjadi peningkatan realisasi, kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah proses legalisasi RDTR WP Bati-Bati, legalisasi RDTR WP Pelaihari dan legalisasi RDTR WP Takisung.

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Realisasi yang dicapai tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk dapat meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten. Saat ini masih terdapat 3% pemanfaatan tata ruang yang dimohonkan oleh pelaku usaha/masyarakat yang tidak sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR dikarenakan pembangunan dilaksanakan sebelum Perda RTRW dan Perbub RDTR ditetapkan yaitu sebelum tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016- 2036 dan direncanakan pada tahun 2023 akan dilakukan proses legalisasi revisi Peraturan Daerah tersebut. Pada tahun 2022 juga telah ditetapkan 3 Peraturan Bupati yaitu:

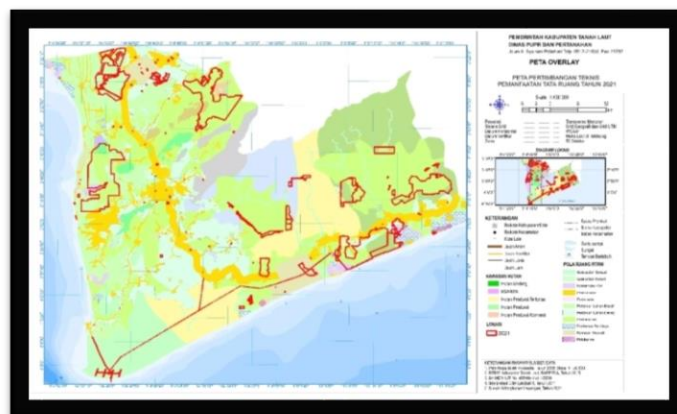
- 1). Peraturan Bupati Nomor No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042.
- 2). Peraturan Bupati Nomor No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042, dan Perbup No 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042.
- 3). Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022.

Dalam pencapaian indikator diatas permasalahan yang dihadapi bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016.

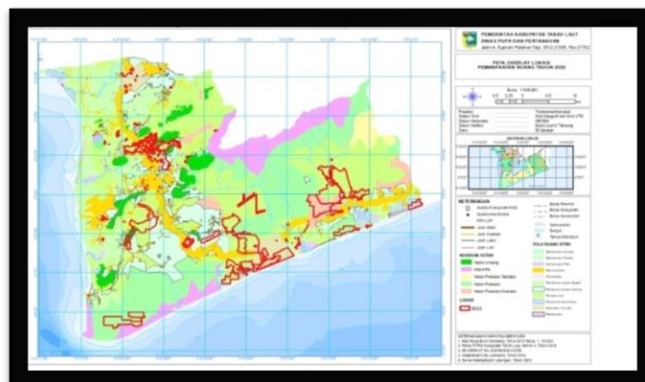
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

- 1). Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 2). mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3). Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
- 4). Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.

Gambar 3.10
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2021



Gambar 3.11
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2022



1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan pejabat fungsional tertentu yang ada pada Bidang Tata Ruang, didukung dengan 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp3.499.999.429,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.819.558.772,- atau 80,56%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.57
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Tata Ruang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	SDM		
					PNS	PTT	TTK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,499,999,429			7	1	1
1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3,384,999,678	2,768,497,522	82.67			
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	994,999,748	789,418,418	79.34			
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2,389,999,930	1,979,079,104	82.81			
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	114,999,751	51,061,250	44.40			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	114,999,751	51,061,250	44.40			
	Total	3,499,999,429	2,819,558,772	80.56			

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Eselon 3 Bidang Tata Ruang selama tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya tenaga teknis bidang tata ruang.
2. Kurangnya informasi data dalam penyusunan RTRW dan RDTR untuk perencanaan dari masing-masing SKPD terkait dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kegiatan yang ada sehingga kegiatan lainnya mampu terlaksana seluruhnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua skpd yang terjalin dengan baik dan lebih intens.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam kegiatan konsultasi publik terkait penyusunan dokumen terkait penyelenggaraan penataan ruang.
4. Memaksimalkan staf PNS dan tenaga PTT yang ada dalam melaksanakan kegiatan.
5. Memberikan pelatihan mengenai GIS dan ilmu ketataruangan agar dapat semakin meningkatkan kinerja PNS dan PTT yang ada.

❖ BIDANG PERTANAHAN

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Pertanahan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.58
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan

			Tahun 2022		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Pertanahan				
1	Meningkatnya pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa /konflik pertanahan	100%	100%	100
		Persentase konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100

❖ Kepala Bidang Pertanahan

Sasaran 1 : Meningkatnya Inventarisasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan.

a. Persentase Penyelesaian sengketa/konflik pertanahan Tahun 2022

$$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tana garapan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3 \text{ Dokumen}}{3 \text{ Dokumen}} \times 100 \% = 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dimana untuk target jumlah pengaduan sengketa tanah 3 Dokumen dan untuk Realisasi penyelesaian sengketa tanah yang di tangani adalah 3 Dokumen dengan capaian persentase sebesar 100 %.

b. Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dimana untuk target dokumen Konsolidasi tanah adalah 2 Dokumen dan untuk Realisasi dokumen Konsolidasi tanah yang dilaksanakan adalah 2 Dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Tambang Ulang dan Dokumen PTSL 2022 dengan capaian persentase sebesar 100 %.

Pada sasaran meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikatornya pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.59
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100%
2	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan juga sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah 100%.
- b. Pencapaian indikator kinerja persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan juga sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.60
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021		
		2020	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa tanah	50%	100%	100%	100%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan/penurunan. Jika dibandingkan pada tahun 2021, dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan realisasi kinerjanya tidak mengalami peningkatan/penurunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi permasalahan Permasalahan Lahan PT. KJW dengan Kelompok Masyarakat Kintap (Syahrudin dkk) di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Melakukan mediasi Permasalahan Asset Pemerintah Daerah di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang.

Permasalahan lahan PT INHUTANI dengan Masyarakat Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan.

Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Batu Ampar.

Gambar 3.12
Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan



Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah di Kab.Tanah Laut}} \times 100\% = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dimana untuk target dokumen Konsolidasi tanah adalah 2 Dokumen dan untuk Realisasi dokumen Konsolidasi tanah yang dilaksanakan adalah 2 Dokumen yaitu Dokumen

Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Tambang Ulang dan Dokumen PTSL 2022 dengan capaian persentase sebesar 100 %.

Pada sasaran meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja kepala bidang pertanahan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.61
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut.

Pencapaian indikator kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.62
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut.

Realisasi kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dimana tahun 2022 tersealisasi sebesar 100% sedangkan tahun 2021 juga terealisasi sebesar 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat

dilihat bahwa realisasi capaian kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut.

Pada indikator kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 realisasinya sama dengan tahun 2021 yaitu 100% dari yang masing-masing ditargetkan. Kegiatan pada indikator ini adalah terkait Inventarisasi data asset bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana pada tahun 2021 dengan target 1 dokumen pada Kecamatan Pelaihari telah terelaisasi 100% dan pada tahun 2022 dengan target 2 dokumen pada 1 dokumen untuk Inventarisasi asset di Kecamatan Tambang Ulang dan 1 Dokumen Program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Laut telah terealisasi 100%.

Gambar 3.13
Kegiatan Terkait
Penyusunan Dokumen Konsolidasi Tanah





Gambar 3.14
Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan



4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Pertanahan, didukung dengan 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan

dengan pagu sebesar Rp. 3.243.130.102,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.806.240.949,- atau 84,53%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.63
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Pertanahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Jumlah SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.243.130.102	2.806.240.949	84,53	5	3	-
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	660.776.487	603.909.494	91.39			
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.430.000	22.650.000	50.98			
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	616.346.487	581.259.494	94.31			
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.582.353.615	2.202.371.000	85,29			
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.582.353.615	2.202.371.000	85.29			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	2.582.353.615	2.202.371.000	85.29			
	Total Pagu	3.243.130.102	2.806.240.949				

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Eselon 3 Bidang Pertanahan selama tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Tumpang tindih alas hak/sertifikat;
2. Pemilik tanah tidak dapat membuktikan penguasaan tanahnya.
3. Pemilik tanah tidak melaksanakan kewajiban memelihara tanda-tanda batas tanah;
4. Kurangnya fasilitas transportasi dalam melaksanakan kegiatan ke lapangan;
5. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki bidang pertanahan;
6. Kurangnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah;
7. Kurangnya sarana penunjang kegiatan dilapangan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan data secara akurat dan komprehensif
2. Perlu ditelusuri status tanah tersebut melalui data yang dimiliki oleh BPN atau kelurahan/desa;

3. Melakukan pengukuran dan pencantuman titik koordinat batas-batas tanah;
4. Meminjam fasilitas bidang lain atau menggunakan fasilitas pribadi;
5. Berkoordinasi terkait data asset pemerintah daerah dengan BPKAD dan kantor BPN kabupaten tanah laut;
6. Mengambil data dukung kelapangan dengang melakukan pengukuran melalui gps garmin montana 680 atau menggunakan drone pinjaman dari bidang lain atau informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa;
7. Memaksimalkan PNS, PTT dan TTK yang dimiliki.

❖ UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.64
Realisasi dan Indikator UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi				
1	Meningkatnya retbusi sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 100.750.000	Rp. 82.410.000	80,1
		Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 299.250.000	Rp. 461.788.500	134
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi dan alat berat	Jumlah alat berat yang dipenuhi	1	0	0
		Jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi	3	3	100

❖ Kepala UPTD Peralatan Pengujian Material Konstruksi

Sasaran : Meningkatnya Retribusi Sewa Alat Uji Material Konstruksi.

Pada sasaran meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi diukur melalui 1 indiaktor, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.65
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 100.750.000	Rp. 82.410.000	80,1
2	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 299.250.000	Rp. 461.788.500	134

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Pencapaian indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2022 pendapatan terealisasi sebesar Rp. 82.410.000,- dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 100.750.000,- sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi adalah 80,1% dari total pendapatan yang ditargetkan.
- b. Pencapaian indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat tahun 2022 pendapatan terealisasi sebesar Rp. 461.788.500,- dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 299.250.000,- sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi adalah 134% dari total pendapatan yang ditargetkan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.66
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 45.950.000	Rp. 162.000.000	Rp. 100.750.000	Rp. 82.410.000	80,1
2	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 81.700.000	Rp. 178.575.000	Rp. 239.250.000	Rp. 461.788.500	134

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Realisasi indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar Rp. 82.410.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 100.750.000,-, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 162.000.000,- dari yang ditargetkan sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah menurun sebesar Rp. 79.590.000,- atau sebesar 42,12%.
- b. Realisasi indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana

tahun 2022 mampu terealisasi sebesar Rp. 461.788.500,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 299.250.000,-, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 178.575.000,- dari yang ditargetkan sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah meningkat sebesar Rp. 222.538.500,- atau sebesar 124,61%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari analisa diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan realisasi kinerja tahun 2022 adanya peningkatan retribusi daerah adalah adanya himbauan bahwa setiap pekerjaan konstruksi yang dilakukan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, agar dalam melakukan uji material konstruksinya supaya dilakukan di UPT Laboratorium. Untuk tahun 2022 banyak paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut maka untuk uji material konstruksi dilakukan di UPT Laboratorium. Selain itu juga ada perubahan biaya uji material konstruksi yang mana peraturan bupati terkait besaran rertribusinya sudah dirubah yaitu Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Pertanahan. Dengan adanya perubahan perbup retribusi ini mampu menambah jumlah pendapatan daerah khususnya pada retribusi uji material konstruksi, yang mana ketetapan harga untuk pengujian material konstruksi sudah disesuaikan dengan perbup terbaru.

❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi.

Sasaran 1 : Melakukan Pemeliharaan Sarana Dan Prasanana Alat Uji Material Konstruksi

Pada sasaran melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.67
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag Tata Usaha
UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	68 Buah	71 Buah	104
2	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	158 Layanan	180 Layanan	114
3	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat	6 Orang	0 Orang	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Pencapaian indikator kinerja jumlah sarana dan prasaran alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik tahun 2022 terealisasi sebanyak 71 buah dari yang ditargetkan juga sebanyak 68 Buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah sarana dan prasaran alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah 104%.
- b. Pencapaian indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi tahun 2022 terealisasi sebanyak 180 Layanan dari yang ditargetkan juga sebanyak 158 layanan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi adalah 114%.
- c. Pencapaian indikator kinerja Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat tahun 2022 terealisasi sebanyak 0 orang dari yang ditargetkan juga sebanyak 6 orang, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah 0%.

Sasaran 2 : Melakukan Pelayanan Administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Pada sasaran melakukan pelayanan administrasi **UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi** diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.68
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU
UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	8 Jenis	53 Jenis	68 buah	71 Buah	104
2	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	60 Layanan	60 Layanan	158 Layanan	180 layanan	114
3	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat	0 orang	0 orang	6 Orang	0 orang	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Realisasi indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasi kinerjanya adalah meningkat sebanyak 71 Buah, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah tetap yaitu sebanyak 71 buah.
- b. Realisasi indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasi kinerjanya adalah meningkat menjadi sebanyak 180 layanan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi adalah meningkat yaitu sebanyak 180 layanan.
- c. Realisasi indikator kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasi kinerjanya adalah tetap sebanyak 0 orang, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat adalah tetap yaitu sebanyak 0 orang.

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Realisasi Kinerja

- a. Pada indikator jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik tetap sama dengan tahun sebelumnya, hal ini di karenakan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak ada penambahan/pembelian alat uji material konstruksi yang baru, sehingga pemeliharaan rutin dilaksanakan pada alat yang sudah ada, sehingga jumlah alat uji material konstruksi yang dimiliki UPT Laboratorium yaitu tetap sebanyak 71 buah
- b. Pada indikator jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya, sehingga jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sebanyak 180 layanan

- c. Pada indikator kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat tetap sama dengan tahun sebelumnya, hal ini di karenakan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak ada terlaksananya kegiatan untuk melaksanakan diklat SDM yang bersertifikat pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi, sehingga kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat yang dilaksanakan UPTD Peralatan dan Pengujian Material yaitu tetap sebanyak 0 orang

Tabel 3.69
Alat Uji UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
1	2	3	4
1	Diamond Core Bit 4"	2013	1 Pcs
2	Core Drilling Test	2013	1 Pcs
3	Sand Cone Test Set	2014	2 Set
4	Balance (0,01 gram sensitivity)	2014	2 Pcs
5	Balance (0,1 gram sensitivity)	2014	3 Pcs
6	Oven Laboratorium	2018	1 Pcs
7	Los Angeless Abrassion Machine	2018	1 Pcs
8	Copression Machine ASTM C-39	2018	1 Pcs
9	Dynamic Cone Penetrometer	2018	1 Pcs
10	Digital Balance (Cap 30Kg x 1 gr)	2018	1 Pcs
11	Digital Balance (Cap 10Kg x 0,1 gr)	2018	1 Pcs
12	Cetrifuge Exctractor Test	2013	1 Pcs
13	Filter Paper Low Ash	2013	4 Pak
14	Marshall Test Set	2013	1 Set
15	Hydrometer Analysis Test Set	2013	2 Set
16	Motorised Laboratory CBR Test Set	2013	1 Set
17	Shrinkage Limit Test Set	2013	1 Set
18	Proving Ring Penetrometer	2013	1 Pcs
19	Termometer Metal	2013	2 Pcs
20	Specific Grafity and Absorption Of Coarse Agregat Test Set	2013	1 Set
21	Hand Operated Liquid Limit Test Set	2013	4 Set
22	Concrete Test Hammer	2013	1 Pcs

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
23	Absorption Of Fine Aggregate Test Set	2014	1 Set
24	Compaction Test Set	2014	2 Set
25	Wash Bottle	2014	2 Pcs
26	Bottle Roller	2014	2 Pcs
27	Stopwatch	2014	1 Pcs
28	Vernier Caliper	2014	4 Pcs
29	Plastic Limit Test Set	2014	1 Pcs
30	Concrete Cube Mold (15 X 15 X 15 cm)	2014	5 Pcs
31	Slump Test Set	2014	2 Pcs
32	Brass Round Sieve 3"	2014	1 Pcs
33	Brass Round Sieve 2 1/2"	2014	2 Pcs
34	Brass Round Sieve 2"	2014	2 Pcs
35	Brass Round Sieve 1 3/4"	2014	2 Pcs
36	Brass Round Sieve 1 1/4"	2014	2 Pcs
37	Brass Round Sieve 1"	2014	2 Pcs
38	Brass Round Sieve 3/4"	2014	2 Pcs
39	Brass Round Sieve 1/2"	2014	2 Pcs
40	Brass Round Sieve 3/8"	2014	2 Pcs
41	Brass Round Sieve 1/4"	2014	2 Pcs
42	Brass Round Sieve No.4"	2014	3 Pcs
43	Brass Round Sieve No 8"	2014	2 Pcs
44	Brass Round Sieve No.10"	2014	2 Pcs
45	Brass Round Sieve No.12"	2014	1 Pcs
46	Brass Round Sieve No.16"	2014	2 Pcs
47	Brass Round Sieve No.30"	2014	2 Pcs
48	Brass Round Sieve No.40"	2014	2 Pcs
49	Brass Round Sieve No.50"	2014	2 Pcs
50	Brass Round Sieve No.80"	2014	2 Pcs
51	Brass Round Sieve No.100"	2014	2 Pcs
52	Brass Round Sieve No.200"	2014	2 Pcs
53	Brass Round Sieve Pan and Cover	2014	2 Pcs
54	Piknometer Agregat Halus	2022	1 Pcs
55	Piknometer Filler (Semen)	2022	1 Pcs
56	Piknometer Tanah	2022	1 Pcs

Gambar 3.15
Kegiatan yang dilakukan pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
MOTOR GRADER 330**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
MOTOR GRADER 320**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
VIBRATING ROLLER 10 TON**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
THREE WHEEL ROLLER 8 TON**

**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
TANDEM ROLLER 4,5 TON**

	
	<p>PENGOPERASIAN ALAT BERAT BABY ROLLER</p>
	<p>PENGOPERASIAN ALAT BERAT WHELL LOUDER</p>
	<p>PENGOPERASIAN ALAT BERAT EXCAVATOR MINI</p>
	<p>PENGOPERASIAN DUMP TRUCK</p>



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
RUMMER**



**PENGOPERASIAN FLAT BED RTUCK
WITH CRANE**



PENGUJIAN DESAIN MIX LPPA A



PENGUJIAN CORE DRILL



PENGUJIAN DESAIN MIX LPPA B



PENGUJIAN SAND CONE



4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan yang ada pada UPT Peralatan, didukung dengan 1 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 198.855.982,- dan terealisasi sebesar Rp. 168,631,070- atau 84,80%. Dan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan yang ada pada UPT Labotatorium, didukung dengan 1 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 280,237,713,- dan terealisasi sebesar Rp. 273,422,050- atau 97,55%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.70
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Jumlah SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	
	UPT PERALATAN	198,855,982	168,631,070	84,80			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	198,855,982	168,631,070	84,80	8	12	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	28,936,897	18,017,000	62.26			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,601,376	4,496,000	97.71			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,048,134	8,061,500	89.10			
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,412,387	982,000	69.53			
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13,875,000	4,477,500	32.27			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,228,135	5,088,020	97.32			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312,400	307,020	98.28			
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,915,735	4,781,000	97.26			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164,690,950	145,526,050	88.36			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107,250,000	88,981,050	82.97			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	57,440,950	56,545,000	98.44			
	UPT LABORATORIUM	280,237,713	273,422,050	97,55			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112,940,157	108,654,050	96,20			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65,374,831	62,720,500	95.94			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,713,588	4,251,000	90.19			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,605,863	23,097,500	97.85			

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,105,380	15,422,000	90.16			
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,950,000	19,950,000	100			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,275,326	8,795,000	98.83			
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,275,326	8,795,500	94.83			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,290,000	37,138,550	96.99			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,500,000	26,348,550	95.81			
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,790,000	10,790,000	100			
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	167,297,556	164,768,000	98.48			
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167,297,556	164,768,000	98.49			
1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	167,297,556	164,768,000	98.49			

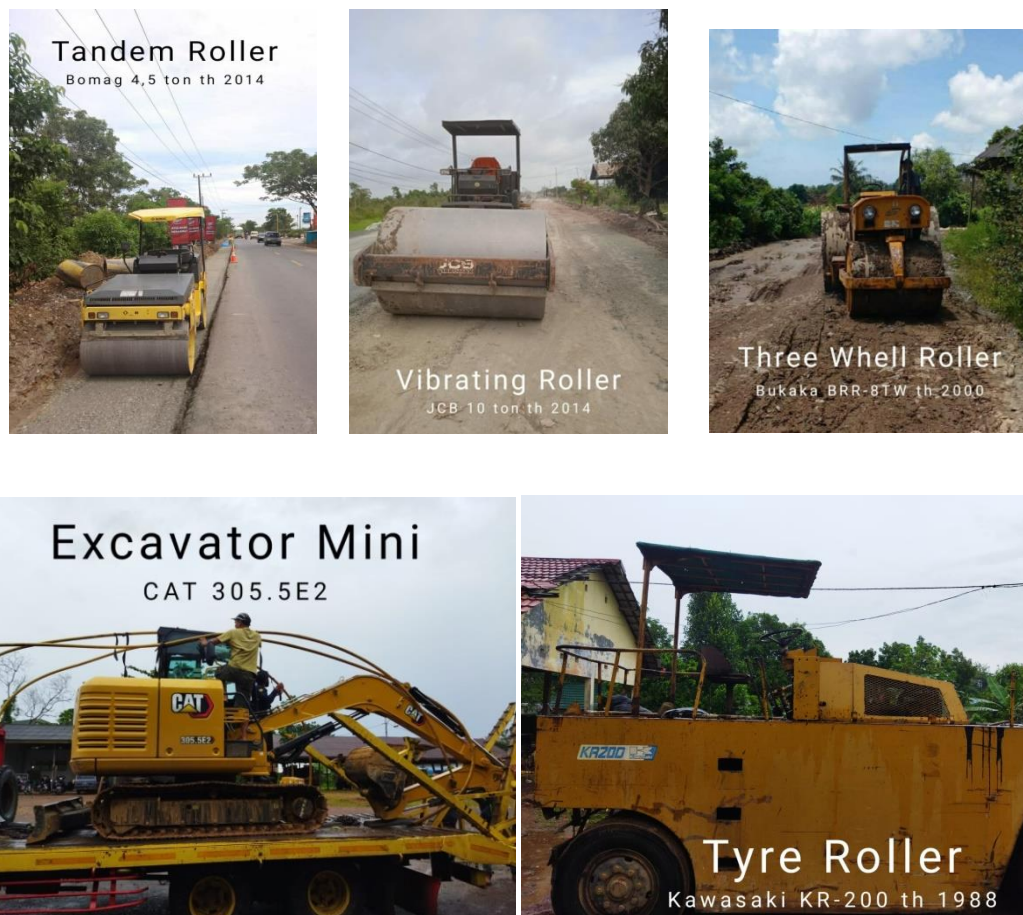
Beberapa alat berat yang dimiliki UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sampai dengan tahun 2022, tidak ada penambahan pembelian yang baru pada anggaran perubahan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.71
Jenis Alat Berat dan Alat Lainnya Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang/ Register	Keterangan
1	2	3	
1	Truck Crane Toyota Diesel 3,4	1 Unit	1988
2	Tyre Roller KR 200	1 Unit	1988
3	Whell Loader	1 Unit	1991
4	Baby Roller Dynamic RS 600D	1 Unit	1995
5	Dump Truck RR Izuzu ELF 120 PS	1 Unit	1995
6	Motor Grader MG 230	1 Unit	1995
7	Baby Roller Meiwa MG-7	1 Unit	2000
8	Three Whell Roller Bukaka BRR-8TW	1 Unit	2000
9	Motor Grader MG 330	1 Unit	2014
10	Plate Compactor Tacom	1 Unit	2014
11	Rammer Tacom Tv 85DF	1 Unit	2014

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang/ Register	Keterangan
12	Vibrating Roller TCB 10 Ton	1 Unit	2014
13	Tandem Roller Bomag 4,5 ton	1 Unit	2014
14	Excavator Mini CAT 305 5E2	1 Unit	Pembelian 2021
15	Genset ST IF 12000T3	1 Unit	Pembelian 2021

Gambar 3.16
Beberapa Alat Berat Pada UPT Peralatan



Dalam pencapaian indikator diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi UPT Peralatan diantaranya :

- 1) Target Pendapatan dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan kondisi peralatan yang dimiliki UPTD sebagian besarnya rusak berat, dikarenakan tahun produksi alat yang cukup tua (1989,1995, dan 2014) terkadang untuk pemeliharaan kesulitan dalam mencari suku cadang di pasaran.
- 2) Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan jasa rental alat berat yang lebih maju, meskipun dengan harga bersaing .

- 3) Dari Perhitungan usia ekonomis dari 15 alat berat yang dimiliki UPTD, yang biasa digunakan oleh jasa rental swasta, Cuma 1 Alat yang memiliki kriteria sisi umur ekonomis yaitu Excavator Mini (Trakindo CAT) tahun 2021, sehingga diperlukan penambahan jenis alat berat setiap tahunnya.
- 4) Sumber Daya Manusia (Operator) masih banyak belum memiliki sertifikat sebagai operator, dan keterampilan teknis pendukung lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan upaya pemeliharaan semaksimal mungkin, dan mengusulkan peningkatan biaya pemeliharaan dari Rp. 18.047.505,- menjadi Rp 57.440.950,- pada anggaran perubahan dengan menggeser pembiayaan yang lainnya.
- 2) Menjaring kerjasama pelayanan sampai luar kabupaten dan luar provinsi, sehingga 2 Alat Berat disewa secara kontinyu di salah satu perusahaan sawit di kabupaten Paser Kalimantan Timur.
- 3) Menyusun program peremajaan alat berat, dan terus mengusulkan ke Pemerintah daerah, untuk penambahan alat berat disetiap tahun anggaran.
- 4) Melakukan koordinasi dengan PUPR Regional Kalimantan Selatan yang ada di Banjarmasin, untuk dapat melaksanakan pelatihan bagi operator dan tenaga teknis lainnya.

Dalam pencapaian indikator diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi UPT Laboratorium diantaranya :

- 1) Sumber daya manusia (Personil laboratorium material konstruksi) yang tersedia sangat terbatas dan tidak bersertifikat dikarenakan kebijakan mutasi pegawai yang bersertifikat tidak ditugaskan lagi pada unit laboratorium.
- 2) Biaya pemeliharaan untuk alat uji yang dimiliki terbatas, dan sejak pengadaan tahun 2017 alat tersebut tidak validasi
- 3) Pemanfaatan alat uji terbatas, dikarenakan model alat versi lama, dan pemahaman pemakaian variasi alat uji rendah
- 4) Operasional pelayanan pengujian dilapangan terkendala dengan sarana dan prasarana operasional (mobil) untuk keperluan pengujian.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, dan meminjam tenaga teknis

ahli khusus pengujian, sehingga kesetaraan hasil uji laboratorium valid,

- 2) Melakukan pemeliharaan pada beberapa alat uji laboratorium dengan bekerjasama dengan Badan Pengujian Sertifikasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemetrolagian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan.
- 3) Memaksimalkan pemanfaatan alat yang biasa digunakan, dan memotivasi SDM Laboratorium untuk selalu belajar secara mandiri terhadap penggunaan alat laboratorium dan menugaskan mereka mengikuti kegiatan penambahan wawasan pada unit laboratorium material konstruksi di kabupaten lain, dan luar provinsi (PUPR Kota Palangkaraya)
- 4) Pengaturan jadwal operasional lapangan yang lebih teratur, antara sub unit kerja peraltan dan sub unit kerja laboratorium dan memanfaatkan kendaraan operasional kepala UPTD, yang dipelihara dengan mengadakan perawatan kendaraan yang dimodifikasi agar dapat mencapai daerah-daerah pengujian yang strategis.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp.298.381.563.726,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp.279.426.915.474,-** atau **93,65%**, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Alokasi anggaran belanja operasi Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 108.613.552.065,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.831.530.618,- atau 92,84% dengan rincian:

- 1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 9263.780.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.209.115.942,- atau 88,62%.
- 2) Belanja Barang Jasa dengan pagu Anggaran Rp. . 92.306.141.081,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.837.253.676,- atau 92,99%.
- 3) Belanja Hibah dengan pagu anggaran Rp.7.043.600.014,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.785.161.000,- atau 96,33 %..

2. Belanja Modal.

Belanja Modal terdiri dari belanja Modal Tanah, belanja Modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja modal Aset Tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal adalah sebesar Rp.189.768.041.661,- Realisasi belanja modal sebesar Rp.178.595.029.856,- atau 94,11%. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Tanah dengan pagu anggaran Rp.0 dengan realisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp.405.588.826,- dengan realisasi sebesar Rp.458.696.900,- atau 88,42%.
- 3) Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.814.453.266,- dengan realisasi sebesar Rp.29.311.123.100,- atau 95,12%.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan pagu anggaran Rp. 158.432.601.495,- dengan realisasi sebesar Rp.148.820.517.930,- atau 93,93%.

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan pagu anggaran 62.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.800.000,- atau 92,93%

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.72
Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran Dinas PUPRP
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
			Rp	Rp	%
	SEKRETARIAT				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PUPRP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
		Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	36.908.200	35.154.400	95.25
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	9.290.290.970	8.228.831.242	88.57
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	30.000.000	19.000.000	63.33
		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1.258.272.169	997.789.935	79.30
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2.704.792.413	2.385.598.112	88.20
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	310.958.112	196.249.850	63.11
	BIDANG BINA MARGA				
4	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap kabupaten	Program penyelenggaraan jalan			
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	156.636.096.471	150.051.466.661	95.80
	BIDANG CKJK				
5	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum			
		Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota	38.221.067.443	34.543.639.080	90.38
6	Meningkatnyarumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah			

		Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	2.727.000.000	2.685.620.000	97.49
7	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase			
		Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	13.564.829.000	12.363.991.100	91.15
8	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Program penataan bangunan gedung			
		Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	31.584.655.137	30.020.728.114	95.16
		Program penataan bangunan dan lingkungannya			
		Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	59.999.400	36.397.848	60.66
9	Meningkatnya kualitas sdm jasa konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi			
		Kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	395.353.831	207.302.300	52.43
BIDANG SDA					
10	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Program pengelolaan sumber daya air (sda)			
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.698.486.658	19.320.490.336	93.34
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.676.632.696	12.285.925.550	89.83
BIDANG TATA RUANG					
11	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang			
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3.384.999.678	2.768.497.555	82.67
		Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	114.999.751	51.061.250	44.40

BIDANG PERTANAHAN					
12	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Program penyelesaian sengketa tanah garapan			
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	102.926.376	102.926.376	100,00
13	Meningkatnya kooedinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Program penyelesaian sengketa tanah garapan			
		Kegiatan Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	660.776.487	603.909.494	91.39
		Program penatagunaan tanah			
		Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	2.582.353.615	2.202.371.000	85.29
UPT LABORATORIUM					
14	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	65.374.831	62.720.500	95.94
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	9.275.326	8.795.000	98.83
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	38.290.000	37.138.550	96.99
		Program pengembangan jasa konstruksi			
		Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	167.297.556	164.768.000	98.49
UPT PERALATAN					
	Meningkatnya retribusi sewa alat berat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	28.936.897	18.017.000	62.26
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5.228.135	5.088.020	97.32
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	164.690.950	145.526.050	88.36

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 – 2022

Pada Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Melaksanakan 13 program dengan 23 kegiatan dan 88 sub kegiatan, sedangkan Pada tahun anggaran 2022 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 12 program dengan 19 kegiatan dan 61 sub kegiatan, sehingga di tahun 2022 ada sedikit pengurangan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan karena penyesuaian numenklatur Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 pemutakhiran.

A. Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 12 program dengan 19 kegiatan dan 61 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 3 program dengan 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan, yang terbagi kedalam 2 UPT yaitu UPT Laboratorium berjumlah 2 program, 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sedangkan UPT Peralatan berjumlah 1 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.73
Perbandingan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	
		2021	2022
		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
a.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

		Daerah	Daerah
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
4.		Koodrinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-
5.		Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	-
6.		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
b.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-
4.		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-
5.		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	-
6.		Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-
7.		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n Skpd	
c.		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
d.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
d.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.		-	Penyediaan Bahan/Material
e.		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
5.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya	-
	BIDANG BINA MARGA		

B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2.		Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan
3.		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar
4.		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan
5.		Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan
6.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
7.		Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan
8.		Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan
9.		Rehabilitasi Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
10.		Pemeliharaan Rutin Jembatan	-
	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI		
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2.		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
3.		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
5.		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan

		Perkotaan	Perkotaan
6.		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
a.		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
b.		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
2.		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
3.		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
4.		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	-
5.		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	-
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
c.		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN		

	LINGKUNGANNYA		
d.		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
H.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
e.		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2.		-	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
f.		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kontruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-
1.		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Kontruksi	-
g.		Kegiatan Penertiban Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-
1.		Kegiatan Pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	-
h.		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertb Pemanfaatan Jasa Kontruksi	-
1.		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontruksi	-
	BIDANG SUMBER DAYA AIR		
I.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
a.		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi

		Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
3.		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
4.		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
5.		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
6.		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
7.		Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai
8.		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
9.		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
10.		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
b.		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
2.		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
3.		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
4.		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan)
5.		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
6.		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

7.		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-
8.		Rehabilitasi Bendung Irigasi	-
9.		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-
10.		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	-
11.		-	Operasional Unit Pengelola Irigasi
12.		-	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa (DAK)
	BIDANG TATA RUANG		
J.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
a.		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
2.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
b.		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
2.		Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	-
	BIDANG PERTANAHAN		
K.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		
a.		Kegiatan Pemberiaan Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
1.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberiaan Izin Lokasi Penanaman Modal dan	-

		Kemudahan Berusaha	
L.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
a.		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
M.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
a.		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
	UPT PERALATAN		
N.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
a.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
1.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
2.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
b.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	-
c.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
d.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
4.		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan Lainnya	-
	UPT LABORATORIUM		
O.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
a.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
b.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

		SKPD	SKPD
5.		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	-
c.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
3.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	-
d.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, ndan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
P.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
a.		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

B. Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 13 program dengan 23 kegiatan dan 88 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 3 program dengan 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan, yang terbagi kedalam 2 UPT yaitu UPT Laboratorium berjumlah 2 program, 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan, sedangkan UPT Peralatan berjumlah 1 program, 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.74
Perbandingan APBD Tahun 2021 dan 2022

No	2021		2022	
1.	Belanja operasi	76.086.501.549,00	Belanja operasi	108.613.522.065
2.	Belanja modal	234.681.861.776,00	Belanja modal	189.768.041.661
	Total	310.768.363.325,00	Total	298.381.563.726

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya peningkatan anggaran pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, baik pada belanja operasi maupun pada belanja modal, dimana belanja operasi menjadi Rp. 76.086.501.549,- dan belanja modal menjadi Rp. 234.681.861.776,-. Hal ini dimana tahun 2021 banyak kegiatan – kegiatan yang fokus pada perbaikan infrastruktur, akibat adanya bencana banjir yang cukup besar melanda wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang mana banyaknya infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir tersebut, khususnya jalan, selain juga beberapa bangunan publik yang terkena dampak bencana banjir. Kemudian ditahun 2021 pada bidang pertanahan untuk mendukung salah satu program pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini BPN Kabupaten Tanah Laut yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu adanya konsolidasi tanah terkait Hibah Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 2500 persil atau bidang (sertifikat tanah) yang diberikan kepada warga/masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 ada perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan, serta ada nomenklatur baru dengan bertambahnya sub kegiatan. Dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Terkait hal tersebut semua OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyesuaikan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019, begitu juga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sudah melaksanakan pemetaan program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Dari pemetaan tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 memiliki 13 program, 24 kegiatan dan 88 sub kegiatan lebih banyak dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 yang memiliki 8 program dan 38 kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 30 Tahun 2006.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **5 Sasaran dengan 7 Indikator** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 100% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dalam meningkatkan penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana
3. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level Eselon II sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
5. Melakukan pelelangan barang dan jasa sejak dini agar waktu pekerjaan bisa lebih cepat dan meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja serta manfaat pekerjaan bisa dirasakan lebih awal.